



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu-Isu Strategis.....	2
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	6
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	8
1.5 Sistematika Penulisan	15
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	17
2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	24
2.3 Perjanjian Kinerja.....	40
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	53
3.2 Realisasi Anggaran Dan Pendapatan.....	128
3.3 Capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	130
BAB IV PENUTUP	134
4.1 Kesimpulan	134
4.2 Rekomendasi	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	10
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	11
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024.....	12
Tabel 1. 4 Jenis dan Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	14
Tabel 2. 1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	19
Tabel 2. 2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna 2022-2026.....	20
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	20
Tabel 2. 4 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	25
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024 .	40
Tabel 2. 6 Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	42
Tabel 3. 1 Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	54
Tabel 3. 2 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	56
Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Selama 3 Tahun (2023-2024).....	67
Tabel 3. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022-2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat	78
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	83
Tabel 3. 6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan	85
Tabel 3. 7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	93
Tabel 3. 8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	98
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	128
Tabel 3. 10 Indeks Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2022, 2023 dan 2024	132
Tabel 3. 11 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Indeks Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	6
Gambar 1. 2 Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	7
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024	8
Gambar 2. 1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026	18
Gambar 2. 2 Aplikasi SIPKN	50
Gambar 2. 3 Aplikasi Infis Anggaran	51
Gambar 2. 4 Aplikasi E Puskesmas.....	51
Gambar 2. 5 Aplikasi e Kejap	51
Gambar 3. 1 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024	63
Gambar 3. 2 Grafik Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024.....	64
Gambar 3. 3 Grafik Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024	71
Gambar 3. 4 Grafik Angka Kematian Bayi di Kabupaten Natuna.....	72
Gambar 3. 5 Grafik Kelahiran Hidup di Natuna Tahun 2018-2022.....	73
Gambar 3. 6 Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Natuna	74
Gambar 3. 7 Kondisi Geografis Kabupaten Natuna Tahun 2024	75

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024. Laporan kinerja ini, merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Sekaligus laporan kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban Kinerja kepada Bupati selaku Kepala Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa, laporan kinerja yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak, agar laporan kinerja ini menjadi lebih sempurna. Harapan kami, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi kami untuk perencanaan di masa yang akan datang.

Ranai, Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA

HIKMAT ALIANSYAH, SKM

Pembina

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, terdapat 7 agenda, salah satunya adalah “meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Agar terwujud agenda tersebut, maka arah kebijakan kesehatan nasional di antaranya meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pengendalian penyakit; pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan penguatan sistem kesehatan.

Agar terwujudnya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka Dinas Kesehatan mempunyai tugas dengan tahapan meliputi penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksana rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. Hal ini tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang dituangkan dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terdapat beberapa kaidah yang baik, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara yang baik, antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam

pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bertujuan memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2024, maka dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah disusun dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Isu-Isu Strategis

Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mendukung pencapaian misi pertama yaitu Akselerasi Peningkatan Sumber Daya Manusia. Misi tersebut dijabarkan dalam tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya Indeks Kesehatan. Masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah:

1. Masih Tingginya Angka Kesakitan dan Kematian

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Kabupaten Natuna (AKI 2024:199.00/100.000 KH; AKB 2024: 14.92/1.000 KH) meskipun angka ini sudah lebih baik dibanding target nasional (AKI:226/100.000 KH; AKB:24/1.000 KH). Masih adanya kematian ibu di Kabupaten Natuna disebabkan banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih

rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan rujukan pada kehamilan risiko tinggi. Penyebab kematian ibu karena dalam 3 tahun terakhir adalah perdarahan 3 tahun ini. Penyebab terbanyak secara berturut-turut adalah karena hipertensi dan perdarahan.

Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain disebabkan asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Penyebab bayi dengan status gizi buruk bayi dikarenakan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Komitmen yang dirasakan masih kurang dari pemangku kebijakan, pemberi pelayanan, masyarakat dan individu menjadi poin penting masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Angka kesakitan dan kematian penyakit menular masih tinggi, sedangkan penemuan kasus belum optimal. Belum semua desa mencapai *Universal Child Immunization* (UCI), karena masih ada penolakan pemberian imunisasi pada bayi di sebagian wilayah di Kabupaten Natuna. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Natuna. Jumlah penderita dan luas penyebarannya semakin bertambah, seiring dengan meningkatnya mobilitas. Selanjutnya terjadi peningkatan jumlah kasus penyakit menular TB Paru yang disebabkan rendahnya skrining terhadap orang yang terduga TB, sehingga dapat memungkinkan orang dengan TB tidak ditemukan dan mempunyai peluang untuk menularkan. Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit dan Puskesmas.

Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM), kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) serta gangguan kesehatan jiwa cenderung meningkat. Masih kurang optimal deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan penyakit, sehingga diperlukan dukungan regulasi dari *stakeholder*/pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Prevalensi stunting di Kabupaten Natuna tahun 2024 sebesar 10,76% (SIGIZI Terpadu, 2024) Masalah kekurangan gizi yang menjadi prioritas saat ini

adalah malnutrisi kronis pada balita, yang direpresentasikan oleh status antropometri tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah normal, yaitu anak dengan kategori pendek dan sangat pendek, yang disebut stunting. Anak yang mengalami stunting pada masa awal kehidupan sampai lima tahun dikhawatirkan tidak akan mencapai potensi fisik dan mental atau kecerdasan yang maksimal pada masa dewasa. Dampak stunting bersifat permanen dan sulit dikembalikan pada jalur pertumbuhan potensialnya. Anak yang sudah terlanjur pendek (*stunted*) akan menurun potensi pertumbuhan fisiknya, sehingga menghambat potensi-potensi kemampuan atau ketrampilan lainnya yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidup selanjutnya. Serta anak yang *stunted* juga merepresentasikan menurunnya kecerdasan. Akibatnya pada masa berikutnya akan memiliki kemampuan kognitif yang rendah yang menyebabkan kualitas kerja yang tidak kompetitif sehingga mempengaruhi rendahnya produktivitas ekonomi. Tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Natuna dikhawatirkan akan terjadi *lost generation* pada masa yang akan datang.

2. Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) menurut jenis pelayanannya terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta. Salah satu indikator penilaian mutu Fasyankes adalah dengan akreditasi baik di tatanan pelayanan kesehatan rujukan maupun di pelayanan kesehatan dasar. Tahun 2024 puskesmas terakreditasi sudah mencapai 100% dari 15 Puskesmas dan 1 RSUD sudah terakreditasi. Data tersebut menjadi awal untuk meningkatkan standar mutu bagi Fasyankes dasar dan rujukan dengan tetap memprioritaskan tindakan terhadap keselamatan pasien. Meskipun demikian kurangnya tenaga kesehatan strategis di Puskesmas dan Rumah Sakit serta pemenuhan sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terstandar di Kabupaten Natuna sampai saat ini.

3. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Kesehatan Lingkungan

Peningkatan perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan menjadi salah satu isu strategis utama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perilaku hidup sehat mencakup kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial, seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik yang teratur, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta perilaku preventif seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin.

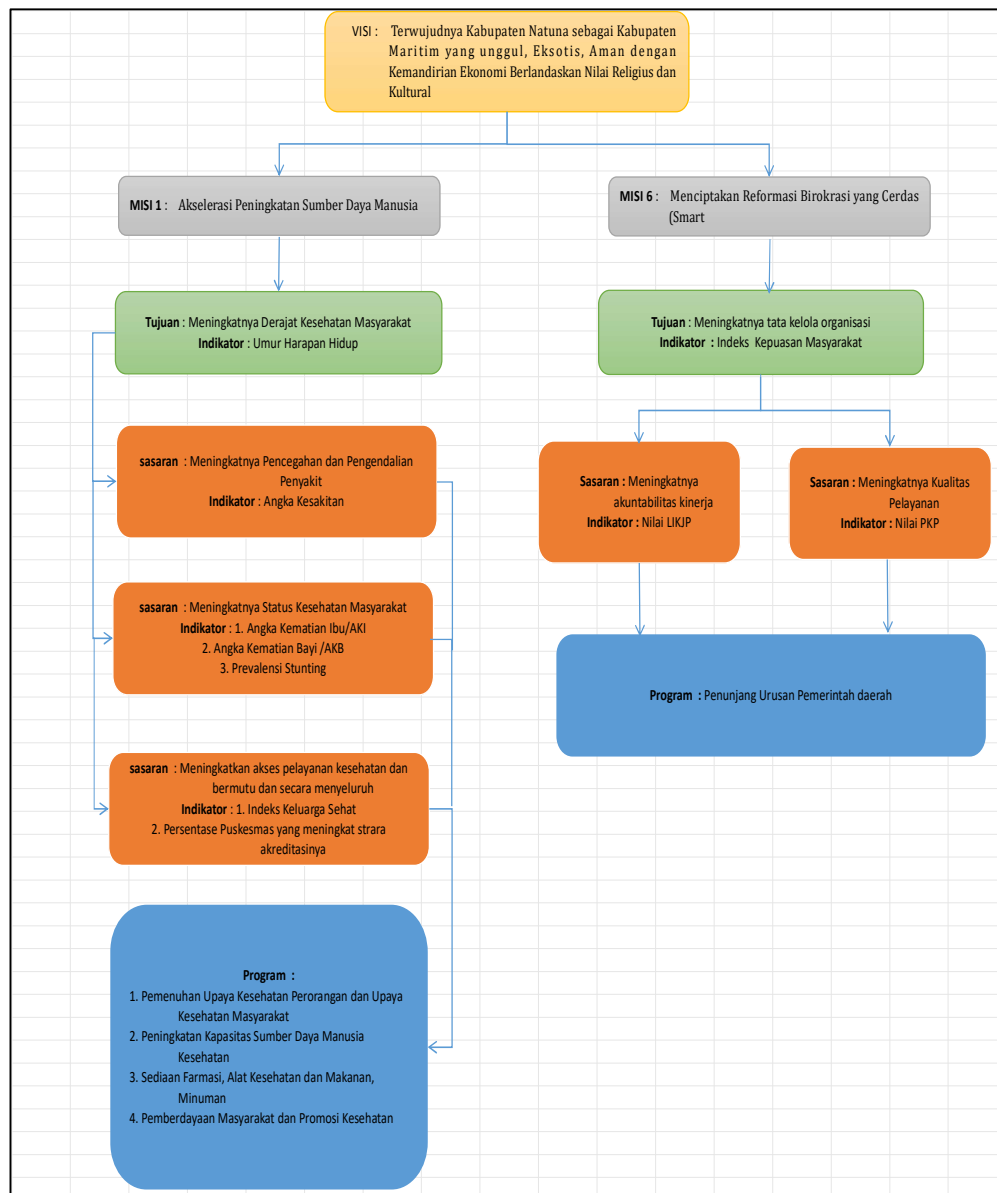
Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Perubahan gaya hidup modern sering kali menyebabkan perilaku kurang aktif secara fisik, konsumsi makanan cepat saji, dan tingkat stres yang tinggi. Di sisi lain, masalah kesehatan lingkungan, seperti akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, pengelolaan sampah yang tidak optimal, dan pencemaran udara, turut memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama di daerah padat penduduk dan wilayah terpencil.

Penguatan promotif dan preventif dilakukan dengan mengoptimalkan Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan GERMAS antara lain, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas penduduk dan mengurangi beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Hal ini mengingat terjadi perubahan penyakit terkait dengan faktor perilaku. Keluarga sebagai fokus pemberdayaan. Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan satuan (unit) terkecil dari masyarakat, terdiri dari ayah, ibu dan anak yang disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang anggotanya mencakup juga kakek/nenek atau individu lain yang memiliki hubungan darah, bahkan juga tidak memiliki hubungan darah (misalnya asisten rumah tangga) disebut keluarga luas. Oleh karena merupakan unit terkecil dari masyarakat, maka derajat kesehatan rumah tangga atau keluarga menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari fungsi upaya kesehatan masyarakat (UKM) dari Puskesmas. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan merupakan kelanjutan dari pemberdayaan keluarga melalui pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah tangga.

1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

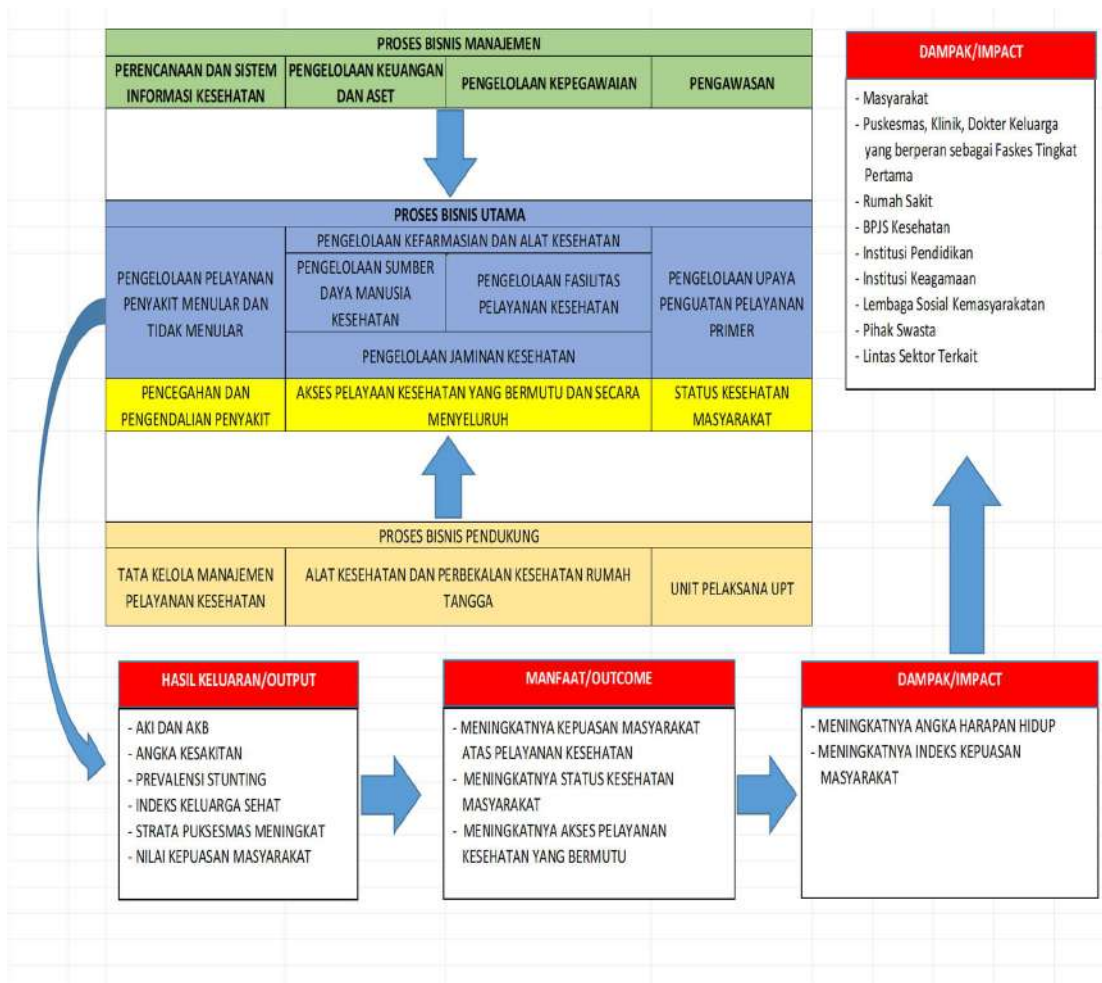
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

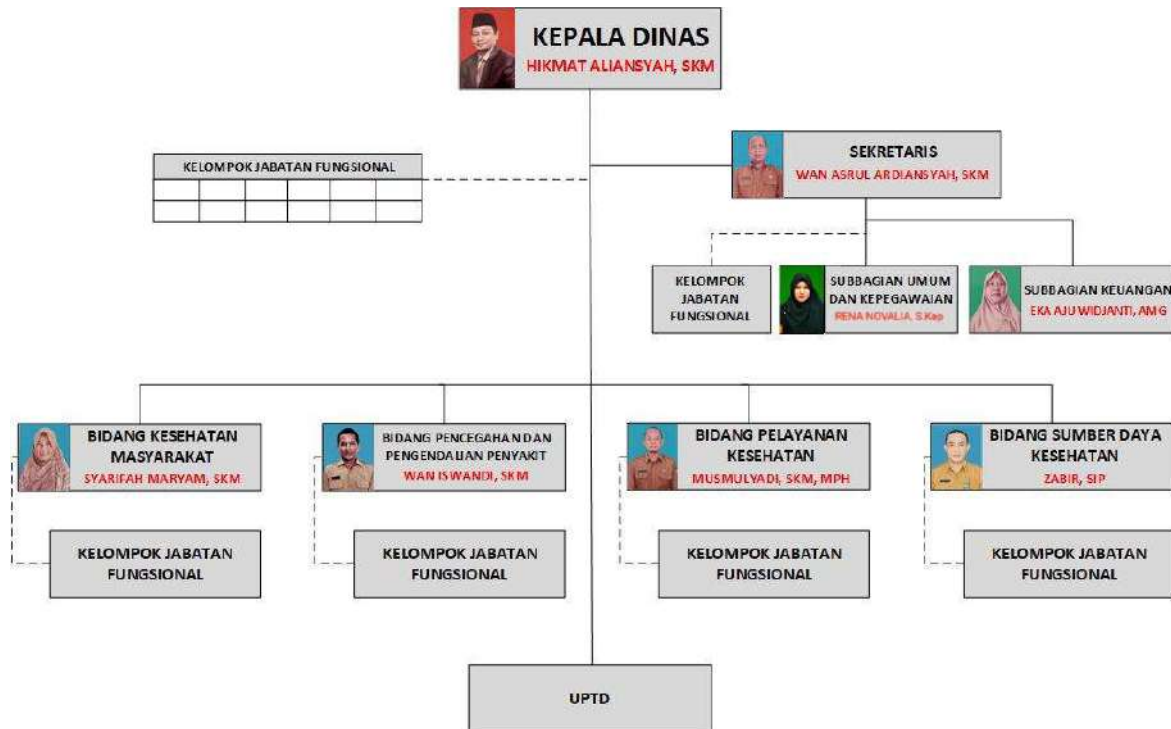


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan pemerintah daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026.

Gambar 1. 2 Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024



1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan terdapat 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, UPT Dinas Kesehatan yaitu:

1. RSUD Natuna
2. Puskesmas Batubi Jaya
3. Puskesmas Bunguran Selatan
4. Puskesmas Bunguran Tengah
5. Puskesmas Kelarik
6. Puskesmas Midai

7. Puskesmas Pulau Laut
8. Puskesmas Pulau Tiga
9. Puskesmas Pulau Tiga Barat
10. Puskesmas Ranai
11. Puskesmas Sedanau
12. Puskesmas Serasan
13. Puskesmas Serasan Timur
14. Puskesmas Subi
15. Puskesmas Suak Midai
16. Puskesmas Tanjung
17. Instalasi Farmasi

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Kesehatan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagai berikut :

1. Data Kepegawaian :

a. Pegawai berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan.

Jumlah tenaga aktif di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dan UPTD sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 606 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

NO	INSTITUSI	GOLONGAN KEPEGAWAIAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Dinkes	10	55	6		71
2	Puskesmas Batubi Jaya	1	17	17		35
3	Puskesmas Bunguran Selatan		13	21		34
4	Puskesmas Bunguran Tengah	2	23	14		39
5	Puskesmas Kelarik		18	17		35
6	Puskesmas Midai		17	16		33
7	Puskesmas Pulau Laut		14	16		30
8	Puskesmas Pulau Tiga		10	20		30
9	Puskesmas Pulau Tiga Barat		9	18		27
10	Puskesmas Ranai	5	45	17		67
11	Puskesmas Sedanau		18	24		42
12	Puskesmas Serasan		17	22		39
13	Puskesmas Serasan Timur	1	15	20		36
14	Puskesmas Subi		11	21		32
15	Puskesmas Suak Midai		5	2		7
16	Puskesmas Tanjung		23	20		43
17	Instalasi Farmasi	1	6	1		8
	JUMLAH	20	316	272	0	608

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Jumlah tenaga aktif yang paling banyak golongan III sebanyak 316 orang, golongan II sebanyak 272 orang, dan golongan IV sebanyak 20 orang. Struktur birokrasi pada ASN ini dibagi berdasarkan pangkat dan golongan PNS. Di dalam karir abdi negara, pangkat golongan PNS ini sangat dipengaruhi oleh waktu lamanya mengabdikan, diklat jabatan yang pernah diikuti, kompetensi, pendidikan, serta prestasi dari PNS bersangkutan.

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan di lingkup Dinas Kesehatan dan UPT tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

NO	INSTITUSI	Jabatan			Jumlah tenaga Aktif
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinkes	8	28	60	96
2	Puskesmas Batubi Jaya		37	10	47
3	Puskesmas Bunguran Selatan		39	13	52
4	Puskesmas Bunguran Tengah		47	11	58
5	Puskesmas Kelarik		43	11	54
6	Puskesmas Midai		48	5	53
7	Puskesmas Pulau Laut		40	9	49
8	Puskesmas Pulau Tiga		38	7	45
9	Puskesmas Pulau Tiga Barat		39	13	52
10	Puskesmas Ranai		81	12	93
11	Puskesmas Sedanau		53	15	68
12	Puskesmas Serasan		52	10	62
13	Puskesmas Serasan Timur		46	12	58

14	Puskesmas Subi		44	8	52
15	Puskesmas Suak Midai		24	1	25
16	Puskesmas Tanjung		64	7	71
17	Instalasi farmasi	2	5	4	11
	JUMLAH	10	728	208	946

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Jumlah tenaga aktif yang menjabat sebagai pejabat struktural sebanyak 10 orang, pejabat fungsional sebanyak 728 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 208 orang. Banyaknya tenaga fungsional di Dinas Kesehatan dan UPT karena adanya kesempatan menjadi jabatan fungsional secara *inpassing* pada tahun 2020.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

NO	INSTITUSI	TINGKAT PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	JML
1	Dinkes		5	41		23		16	1		86
2	Puskesmas Batubi Jaya			15	1	25		6			47
3	Puskesmas Bunguran Selatan			9	6	28		9			52
4	Puskesmas Bunguran Tengah			14	5	35		4			58
5	Puskesmas Kelarik			16	1	29		8			54
6	Puskesmas Midai			17	2	26		6	1	1	53
7	Puskesmas Pulau Laut			15	1	26		7			49
8	Puskesmas Pulau Tiga			13		27		5			45
9	Puskesmas Pulau Tiga Barat			19	2	25		5	1		52

10	Puskesmas Ranai		1	32	2	50		7	1		93
11	Puskesmas Sedanau			15		40		13			68
12	Puskesmas Serasan			16		39		7			62
13	Puskesmas Serasan Timur			15	1	33		6		3	58
14	Puskesmas Subi			12	1	33		5	1		52
15	Puskesmas Suak Midai			6	2	16	1				25
16	Puskesmas Tanjung			18	4	44		5			71
17	Instalasi farmasi			8		1		2			11
JUMLAH		0	6	281	28	500	1	111	5	4	936

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dan UPT yang telah lulus menempuh pendidikan Magister (S2) sebanyak 6, lulusan Sarjana (S1) sebanyak 281 orang, Diploma 4 (D4) sebanyak 2 orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 500 orang, Diploma 1 (D1) sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 111 orang, dan SLTP sebanyak 5 orang dan lulusan Sekolah Dasar (SD) 4 orang. Adanya pegawai Dinas Kesehatan yang melanjutkan studi jenjang S-2 karena adanya kesempatan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten dengan sumber dana dari APBD Kabupaten yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Jenis dan Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
Tahun 2024

No.	Nama Fasyankes	Tipe	Sarana (%)	Prasarana (%)	Alat Kesehatan
1	RSAU dr. Yuniati Wisma Karyani	D	53.89	48.84	46.15
2	RS Umum Daerah Natuna	C	67.64	79.55	44.5
3	SUBI	Ranap	100	37.04	66.96
4	MIDAI	Ranap	82.46	59.26	49.92
5	PULAU LAUT	Ranap	82.76	50	47.72
6	PULAU TIGA	Ranap	100	29.63	44.23
7	TANJUNG	-	95.56	55.56	43.59
8	SERASAN	Ranap	100	53.7	43.41
9	SERASAN TIMUR	Ranap	98.28	33.33	42.75
10	PULAU TIGA BARAT	Ranap	78.95	27.78	41.32
11	KELARIK	Ranap	100	42.59	39.88
12	RANAI	Ranap	100	50	36.32
13	BUNGURAN SELATAN	-	100	25.93	33.71
14	BATUBI JAYA	-	88.89	46.3	31.3
15	SEDANAU	Ranap	98.25	51.85	25.63
16	SUAK MIDAI	-	71.11	29.63	22.13
17	BUNGURAN TENGAH	-	100	38.89	20.12

Sumber data : ASPAK tahun 2024 (Persentase Kelengkapan Data SPA Puskesmas dan RS)

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Natuna terdiri dari 15 puskesmas (5 puskesmas rawat jalan dan 10 puskesmas rawat inap), 1 RSUD, 1 Instalasi Farmasi, 1 Rumah sakit milik TNI. Rata rata pemenuhan sarana sudah di atas 60 %, untuk prasarana baru 44,70%

sedangkan alat kesehatan 39,98%.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, isu-isu strategis, mandat kinerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran, sistematika penulisan dan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan, strategi dan arah kebijakan, perjanjian kinerja dan instrumen pendukung penerapan SAKIP seperti GRMS dan aplikasi lokal.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran, inovasi dan penghargaan yang diraih tahun 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk meningkatkan kinerja.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Dalam Menyusun indikator kinerja eselon III dan IV menggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan levelnya, dan menyelaraskan dengan indikator kinerja atasannya	1. Kepala Dinas membuat surat nota dinas Dinas nomor 0/8979 tanggal 26 Oktober 2022 perihal hasil evaluasi SAKIP 2022 kepada eselon III untuk menyusun indikator kinerja eselon III dan IV menggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan levelnya, dan menyelaraskan dengan indikator kinerja atasannya dan mengupayakan peningkatan capaian kinerja outcome agar lebih baik dari tahun sebelumnya.
2.	Mengupayakan peningkatan capaian kinerja outcome agar lebih baik dari tahun sebelumnya	2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Eselon III dan IV

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Renstra Dinas Kesehatan disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, yang menjabarkan lebih rinci program dan kegiatan prioritas. Keterpaduan antara RPJMD dengan Renstra Dinas Kesehatan memastikan bahwa pelaksanaan program kesehatan memiliki arah yang jelas dan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Keterkaitan sasaran RPJMD dan tujuan serta sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kab. Natuna sebagai berikut :

VISI Kabupaten Natuna : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural.

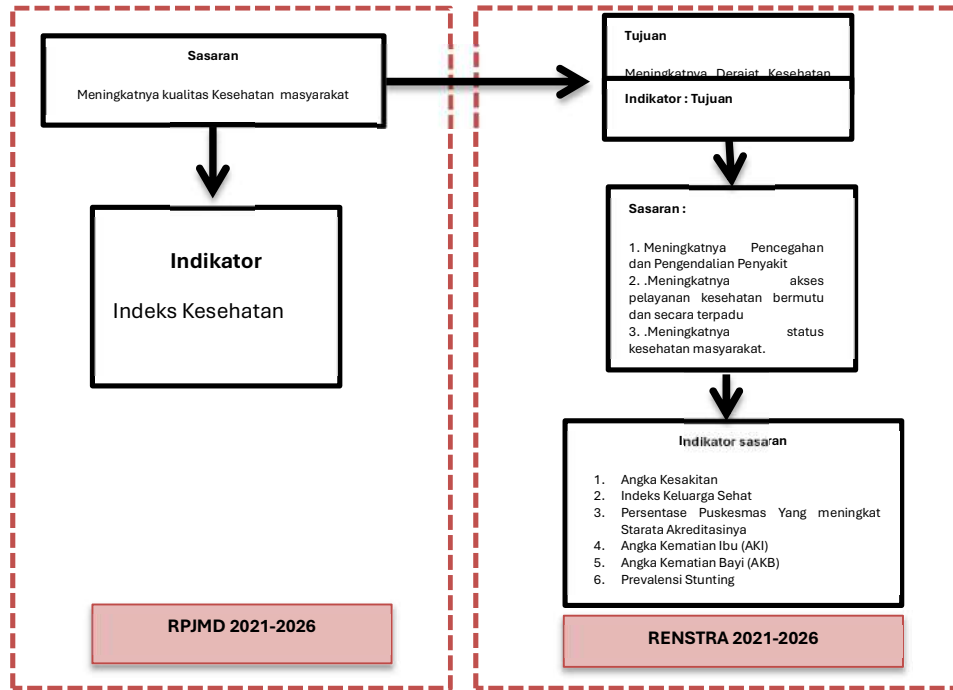
MISI Kabupaten Natuna : Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun					Target Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan daya saing SDM untuk menunjang Peningkatan daya saing wilayah	IPM	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0.689	0.691	0.694	0.700	0.705	0.712	0.712

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Natuna dilaksanakan oleh semua komponen untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produktif secara sosial dan ekonomis agar mampu meningkatkan daya saing SDM itu sendiri.

Gambar 2. 1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026



2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kab. Natuna

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama dibidang Kesehatan di Kabupaten Natuna. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainabe*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Natuna adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya

pencegahan dan pengendalian penyakit; Meningkatnya akses pelayanan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh, Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat. Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Natuna Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Tahun Ke-					Ket
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	64.95	65.10	66.06	67.45	69.15	70.0	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Predikat Nilai Kinerja Dinas Kesehatan		A	A	A	A	A	
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,44	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	

Tabel 2. 2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun Ke-					Ket
						2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Kesakitan	Persen	72.90	72.36	72.02	71.76	71.24	70.98	
		Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Secara Menyeluruh	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0.21	0.22	0.43	0.54	0.62	0.8	
			Persentase Puskesmas Yang Meningkatkan Strata Akreditasinya	Persen	15.30	15.30	28.57	42.85	57.14	71.42	
		Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	12.49	11.70	10.99	10.26	9.53	8.79	
			Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	804.6	659.8	513.1	366.56	219.94	73.30	
			Prevalensi Stunting	Persen	11.00	10.50	10.40	10.30	10.20	10.15	
2.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai LAKIP	Nilai	88.48	88.56	88.64	88.72	88.80	90.10	
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80.1	81.5	82.0	83.0	84.0	85.0	

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna merupakan ukuran atau indikator yang bisa mewakili indikator kinerja yang sudah ada dan menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan sehingga akan memberikan informasi sejauh mana Dinas Kesehatan berhasil mewujudkan dan mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026. Penetapan indikator pencapaian dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Natuna dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	1.2.2.1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Secara Menyeluruh	Persentase Puskesmas Yang Meningkatkan Strata Akreditasinya	Jumlah Puskesmas yang meningkat strata Akreditasinya dibagi Jumlah Puskesmas yang terakreditasi dikali 100%	Propfil kesehatan
2.	1.2.2.1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Secara Menyeluruh	Indeks Keluarga Sehat	Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
3.	1.2.2.1. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Kesakitan	Jumlah penduduk sakit / Jumlah penduduk x 100%	Laporan Dinas Kesehatan
4.	1.2.2.1.1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	laporan Dinas Kesehatan
5.	1.2.2.1.1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun / Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	laporan dinas kesehatan
6.	1.2.2.1.1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Jumlah kasus stunting / Jumlah seluruh balita x 100%	laporan dinas kesehatan
7.	6.1.1.2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat

Cara perhitungan pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase Penduduk yang memiliki Keluhan Kesehatan.

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya, untuk menghitung dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AM = \frac{\frac{\sum \text{Jumlah Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan atau terganggunya aktivitas}}{\sum \text{jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Angka Kematian Bayi per 1000 KH

Angka Kematian Bayi per 1000 KH adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan yang dinyatakan dalam 1000 Kelahiran hidup, untuk menghitung digunakan rumus sebagai berikut :

$$AKBA = \frac{\frac{\text{Jumlah Bayi Usia 0-11 Bulan Yg Meninggal di Suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\sum \text{Lahir Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times \frac{1000}{KH}$$

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh, dengan rumus sebagai berikut :

$$AKI = \frac{\sum \text{Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\sum \text{Lahir Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times \frac{100.000}{KH}$$

Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat pendek : Zscore < -3,0 2. Pendek : Zscore $\geq$ -3,0 s/d Zscore < -2,0 dapat di hitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Prevalensi Stunting} = \frac{\sum \text{Jumlah Balita yang menderita sangat pendek (Stunting)}}{\sum \text{Jumlah Anak Balita diwaktu yang sama}} \times \frac{100.000}{KH}$$

Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8

Puskesmas meningkat strata akreditasinya

Puskesmas meningkat strata akreditasinya adalah puskesmas yang meningkat strata akreditasinya setelah dilakukan survey reakreditasi.

2.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pencapaian Indikator Kinerja

Indeks Kesehatan di kabupaten Natuna tahun 2024, mencapai target yaitu 0.708% angka ini diperoleh dengan metode normalisasi angka harapan hidup, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun demikian ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks Kesehatan di Kabupaten Natuna antara lain:

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang tentunya berdampak positif pada indeks kesehatan adalah, Akses terhadap layanan kesehatan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas yang sudah tersebar di 15 kecamatan, meskipun 2 kecamatan belum ada puskesmas namun masih bisa dicover oleh kecamatan induk. Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Natuna juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, disamping itu kualitas lingkungan yang cukup memadai seperti ketersediaan air bersih.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten Natuna adalah adanya kesenjangan akses layanan kesehatan, masyarakat yang berada di pulau terpencil sulit menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai khususnya bersifat spesialis, distribusi tenaga medis dan paramedis belum merata diseluruh pulau-pulau yang ada, masih adanya penumpukan di salah satu fasilitas kesehatan di daerah perkotaan. Selain itu faktor cuaca ekstrim di waktu-waktu tertentu juga merupakan tantangan bagi masyarakat dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Tinggi angka kesakitan akibat penyakit menular seperti TB, DBD dan penyakit Tidak menular juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi indeks kesehatan.

2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel 2.4, bahwa Dinas Kesehatan melaksanakan 4 (empat) program utama dengan 8 (delapan) kegiatan dan 1 (satu) program penunjang dengan 8 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PRESENTASI %
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	608,941,150.00	147,868,426.00	461,072,724.00	24.28%
<u>01.2.01.0001.</u>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	296,620,320.00	23,448,000.00	273,172,320.00	7.91%
<u>01.2.01.0006.</u>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	312,320,830.00	124,420,426.00	187,900,404.00	39.84%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,309,805,187.00	82,783,709,435.00	16,526,095,752.00	83.36%
<u>01.2.02.0001.</u>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99,309,805,187.00	82,783,709,435.00	16,526,095,752.00	83.36%

01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101,800,000.00	70,035,088.00	31,764,912.00	68.80%
<u>01.2.05.0005.</u>	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,800,000.00	5,154,000.00	646,000.00	88.86%
<u>01.2.05.0011.</u>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96,000,000.00	64,881,088.00	31,118,912.00	67.58%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	767,104,333.00	356,077,039.00	411,027,294.00	46.42%
<u>01.2.06.0002.</u>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,905,000.00	36,236,250.00	52,668,750.00	40.76%
<u>01.2.06.0003.</u>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,997,000.00	6,409,000.00	8,588,000.00	42.74%
<u>01.2.06.0004.</u>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,979,000.00	13,511,600.00	21,467,400.00	38.63%
<u>01.2.06.0005.</u>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44,999,200.00	7,783,250.00	37,215,950.00	17.30%
<u>01.2.06.0006.</u>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%

01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	74,998,700.00	40,893,900.00	34,104,800.00	54.53%
01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433,225,433.00	251,243,039.00	181,982,394.00	57.99%
01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00%
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,082,795,000.00	57,966,990.00	1,024,828,010.00	5.35%
01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	94,867,000.00	14,066,990.00	80,800,010.00	14.83%
01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	787,928,000.00	43,900,000.00	744,028,000.00	5.57%
01.2.07.0007.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709,401,941.00	503,831,858.00	205,570,083.00	71.02%
01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00	4,950,000.00	2,550,000.00	66.00%

<u>01.2.08.0002.</u>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,629,564.00	3,961,500.00	21,668,064.00	15.46%
<u>01.2.08.0004.</u>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	676,272,377.00	494,920,358.00	181,352,019.00	73.18%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357,048,100.00	163,735,733.00	193,312,367.00	45.86%
<u>01.2.09.0001.</u>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322,156,100.00	145,655,733.00	176,500,367.00	45.21%
<u>01.2.09.0011.</u>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34,892,000.00	18,080,000.00	16,812,000.00	51.82%
02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19,515,654,252.00	12,390,115,482.00	7,125,538,770.00	63.49%

	untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
02.2.01.0002.	Pembangunan Puskesmas	10,158,229,200.00	8,280,869,850.00	1,877,359,350.00	81.52%
02.2.01.0007.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	550,301,000.00	317,405,566.00	232,895,434.00	57.68%
02.2.01.0009.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	499,926,800.00	143,144,705.00	356,782,095.00	28.63%
02.2.01.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,670,659,300.00	473,923,731.00	1,196,735,569.00	28.37%
02.2.01.0014.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	242,500,000.00	140,710,000.00	101,790,000.00	58.02%
02.2.01.0020.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	354,644,180.00	14,559,646.00	340,084,534.00	4.11%

<u>02.2.01.0023.</u>	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5,973,653,772.00	2,976,693,084.00	2,996,960,688.00	49.83%
<u>02.2.01.0026.</u>	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	65,740,000.00	42,808,900.00	22,931,100.00	65.12%
02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19,068,460,080.00	14,118,939,528.00	4,949,520,552.00	74.04%
<u>02.2.02.0001.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	407,648,000.00	359,697,750.00	47,950,250.00	88.24%
<u>02.2.02.0002.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	292,125,000.00	285,372,100.00	6,752,900.00	97.69%
<u>02.2.02.0003.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	447,081,820.00	209,244,468.00	237,837,352.00	46.80%

<u>02.2.02.0004.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	67,897,400.00	60,578,180.00	7,319,220.00	89.22%
<u>02.2.02.0005.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	245,613,060.00	207,357,814.00	38,255,246.00	84.42%
<u>02.2.02.0006.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	133,946,500.00	108,126,200.00	25,820,300.00	80.72%
<u>02.2.02.0007.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	245,443,620.00	208,829,163.00	36,614,457.00	85.08%
<u>02.2.02.0008.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	67,121,600.00	24,998,400.00	42,123,200.00	37.24%
<u>02.2.02.0009.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	314,897,500.00	268,496,900.00	46,400,600.00	85.26%
<u>02.2.02.0010.</u>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	211,256,600.00	50,614,514.00	160,642,086.00	23.96%

02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	57,573,400.00	8,026,000.00	49,547,400.00	13.94%
02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	158,309,140.00	0.00	158,309,140.00	0.00%
02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	317,500,000.00	226,613,600.00	90,886,400.00	71.37%
02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	121,253,000.00	58,804,400.00	62,448,600.00	48.50%
02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	589,719,640.00	318,933,440.00	270,786,200.00	54.08%
02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	173,339,000.00	60,205,000.00	113,134,000.00	34.73%
02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	171,635,840.00	27,036,014.00	144,599,826.00	15.75%
02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	410,921,700.00	28,638,200.00	382,283,500.00	6.97%

<u>02.2.02.0026.</u>	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13,461,771,100.00	11,068,932,240.00	2,392,838,860.00	82.22%
<u>02.2.02.0028.</u>	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	63,000,000.00	21,252,500.00	41,747,500.00	33.73%
<u>02.2.02.0029.</u>	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	199,999,800.00	54,925,912.00	145,073,888.00	27.46%
<u>02.2.02.0034.</u>	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10,206,000.00	3,345,000.00	6,861,000.00	32.77%
<u>02.2.02.0035.</u>	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	449,329,420.00	293,154,079.00	156,175,341.00	65.24%
<u>02.2.02.0036.</u>	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	48,600,000.00	0.00	48,600,000.00	0.00%
<u>02.2.02.0038.</u>	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem	272,000,000.00	86,220,320.00	185,779,680.00	31.70%

	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	37,013,940.00	34,412,334.00	2,601,606.00	92.97%
02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	93,257,000.00	45,125,000.00	48,132,000.00	48.39%
02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	223,973,250.00	60,081,250.00	163,892,000.00	26.83%
02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	223,973,250.00	60,081,250.00	163,892,000.00	26.83%
02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	379,813,800.00	110,168,000.00	269,645,800.00	29.01%
02.2.04.0004.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	379,813,800.00	110,168,000.00	269,645,800.00	29.01%

03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	62,117,800.00	19,010,150.00	43,107,650.00	30.60%
<u>03.2.01.0002.</u>	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	62,117,800.00	19,010,150.00	43,107,650.00	30.60%
03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	252,919,600.00	106,092,791.00	146,826,809.00	41.95%
<u>03.2.02.0002.</u>	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	136,640,600.00	60,491,384.00	76,149,216.00	44.27%
<u>03.2.02.0003.</u>	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	116,279,000.00	45,601,407.00	70,677,593.00	39.22%

03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,379,195,800.00	698,121,178.00	681,074,622.00	50.62%
<u>03.2.03.0001.</u>	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,379,195,800.00	698,121,178.00	681,074,622.00	50.62%
04.2.04.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	110,229,900.00	6,693,950.00	103,535,950.00	6.07%
<u>04.2.04.0001.</u>	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	110,229,900.00	6,693,950.00	103,535,950.00	6.07%

	Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	336,678,400.00	67,783,500.00	268,894,900.00	20.13%
<u>04.2.06.0001.</u>	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	336,678,400.00	67,783,500.00	268,894,900.00	20.13%
05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	78,334,250.00	121,665,750.00	39.17%

05.2.01.0001.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	200,000,000.00	78,334,250.00	121,665,750.00	39.17%
05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	254,091,400.00	152,128,800.00	101,962,600.00	59.87%
05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	254,091,400.00	152,128,800.00	101,962,600.00	59.87%
05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250,063,000.00	159,416,200.00	90,646,800.00	63.75%
05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	250,063,000.00	159,416,200.00	90,646,800.00	63.75%

TOTAL	144,970,092,993.00	112,050,109,648.00	32,919,983,345.00	77.29%
--------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------

Sumber data : DPAP Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang terdapat di perjanjian kinerja, di dalamnya mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
TUJUAN :			
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,59

SASARAN:			
1.1	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Kesakitan	71,76
1.2	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Secara Menyeluruh	Indeks Keluarga Sehat	0.54
		Persentase Puskesmas Yang Meningkatkan Strata Akreditasinya	42.85
1.3	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	366.56
		Angka Kematian Bayi	10.26
		Stunting	10.30
TUJUAN :			
2	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	NILAI SAKIP	88.72
SASARAN :			
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Nilai LKIP	88.72
TUJUAN :			
3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.0
SASARAN			
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	83.0

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Natuna untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2. 6 Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun
2024

No	Sasaran Kinerja (Utama, Program, Kegiatan)	Indikator	Satuan	target	Total Anggaran
(1)	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan Penyakit	ANGKA KESAKITAN	Nilai	71.76	1,193,115,780.00
	- <i>Menurunkan Angka kesakitan akibat DBD</i>	<i>INSIDEN RATE DBD</i>	<i>Persen</i>	24.27	<i>260,921,700.00</i>
	- Meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita DBD sesuai standar	Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	Persen	100	260,921,700.00
	- <i>Menurunkan Angka Kesakitan Akibat TB</i>	<i>PERSENTASE KEBERHASILAN PENGobatan TB SEMUA TIPE (SUCCE S RATE)</i>	<i>Persen</i>	<i>99.4</i>	<i>57,573,400.00</i>
	- Meningkatkan Pelayanan kesehatan pada suspect TB	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	57,573,400.00
	- <i>Meningkatnya Kecamatan dengan cakupan IDL mencapai 80%</i>	<i>PERSENTASE KECAMATAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80%</i>	<i>Persen</i>	<i>80</i>	<i>123,035,840.00</i>
	- Meningkatkan bayi usia 0 - 11 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persentase Bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	88.9	123,035,840.00

	- <i>Meningkatnya cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM</i>	<i>PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PANDU PTM</i>	<i>Persen</i>	<i>57.14</i>	<i>593,275,700.00</i>
	- Meningkatkan pasien ODGJ yang dilayani sesuai standar	Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	Persen	100	211,256,600.00
	- Meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus sesuai Standar	Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	Persen	100	314,897,500.00
	- Meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai Standar	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	Persen	100	67,121,600.00
	- <i>Menurunnya Angka Kesakitan akibat HIV</i>	<i>PREVALENSI HIV</i>	<i>per 100.000</i>	<i>0.3</i>	<i>158,309,140.00</i>
	- Meningkatkan pelayanan kesehatan pada orang yang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	158,309,140.00
(2)	MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU DAN SECARA MENYELURUH	INDEKS KELUARGA SEHAT	Nilai	0.54	11,400,410,480.00

2.1	- Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan	PERSENTASE KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	Persen	100	9,949,999,900.00
2.1.1.	- Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki kartu jaminan kesehatan	Jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	Jiwa	46960	9,949,999,900.00
	- Meningkatnya Puskesmas yang melakukan Skrining kesehatan	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKUKAN SKRINING KESEHATAN	Persen	100	746,256,180.00
	- Meningkatnya anak usia pendidikan dasar yang dilayani sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	245,613,060.00
	- Meningkatnya POS UKK dengan Strata yang meningkat	Persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	persen	8.43	121,253,000.00
	- Meningkatnya usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	133,946,500.00
	- Meningkatnya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	245,443,620.00
	- Meningkatnya Cakupan Rumah tangga yang ber PHBS	PERSENTASE RUMAH TANGGA BER PHBS	Persen	33.00	704,154,400.00

	- Meningkatnya kecamatan yang memiliki kebijakan promosi kesehatan	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	Persen	100	200,000,000.00
	- Meningkatnya jumlah kecamatan yang mempunyai forum komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Kecamatan yang mempunyai forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kecamatan	14	254,091,400.00
	- Meningkatnya jumlah posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	120	250,063,000.00
	MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU DAN SECARA MENYELURUH	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENINGKAT STRATA AKREDITASINYA	Persen	42.85	22,151,892,672.00
	<i>- Meningkatnya kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas pelayanan kesehatan yang tersertifikasi akreditasi</i>	<i>PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU FASILITAS KESEHATAN YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI</i>	<i>Persen</i>	<i>82.35</i>	<i>20,621,269,472.00</i>
	- Meningkatnya ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	13,069,116,300.00

	- Meningkatnya Ketersediaan Alkes di pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	445,116,180.00
	- Meningkatnya Ketersediaan Obat dan BMHP yang memenuhi standar	Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan	Persen	85	6,035,893,772.00
	- Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	persen	82.35	449,329,420.00
	- Meningkatnya Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar	Persentase Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar	Persen	100	272,000,000.00
	- Meningkatnya pasien rujukan terlayani sesuai standar	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	Persen	100	349,813,800.00
	- MENINGKATNYA PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA SESUAI STANDAR	<i>PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA SESUAI STANDAR</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>1,530,623,200.00</i>
	- Meningkatnya fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	Persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	Persen	100	62,117,800.00
	- Meningkatnya SDM yang memenuhi standar di	Persentase SDM yang memenuhi standar di	Persen	100	252,919,600.00

	fasilitas pelayanan kesehatan	fasilitas pelayanan kesehatan			
	- Meningkatnya SDM yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase SDM yang memiliki sertifikat diklat/kursus	Persen	65	1,215,585,800.00
	MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT	ANGKA KEMATIAN BAYI	per 1.000 KH	10.26	447,058,820.00
	<i>- Meningkatnya cakupan Neonatus yang dilayani sesuai standar</i>	PERSENTASE NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DITANGANI SESUAI STANDAR	<i>persen</i>	57.38	447,058,820.00
	- Meningkatnya bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	447,058,820.00
	MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT	ANGKA KEMATIAN IBU	per 100.000 KH	366.56	699,773,000.00
	<i>- Meningkatnya pertolongan persalinan difasilitas kesehatan</i>	PERSENTASE PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	<i>persen</i>	100	699,773,000.00
	- Meningkatnya ibu bersalin yang menepatkan pelayanan	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	292,125,000.00

	kesehatan sesuai standar				
	- Meningkatnya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	407,648,000.00
	MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT	PREVALENSI STUNTING	Persen	10.3	1,175,116,840.00
	- Menurunnya cakupan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	PERSENTASE BBLR	Persen	4.1	317,500,000.00
	- Meningkatnya Ibu hamil KEK mendapat layanan sesuai standar	Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar	Persen	100	317,500,000.00
	- Meningkatnya Desa/Kelurahan ODF	PERSENTASE DESA/KELURAHAN ODF	Persen	90	199,999,800.00
	- Meningkatnya desa/kelurahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	Persen	90	199,999,800.00
	- Meningkatnya Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Balita Sehat	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN BALITA SEHAT DAN BALITA SAKIT	Persen	100	67,897,400.00
	- Meningkatnya Balita yang mendapatkan Pelayanan	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan	Persen	100	67,897,400.00

	Kesehatan sesuai standar	kesehatan sesuai standar			
	- Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES AIR BERSIH	Persen	92.32	589,719,640.00
	- Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	Persen	25808	589,719,640.00
	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Nilai	83.00	84,938,900,980.00
	- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	INDEKS KEPUASAN PENGGUNA (IKM DINKES)	Nilai	87.76	2,497,400,521.00
	- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	Nilai	76.1	20,087,569,000.00
	- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) RSUD	Nilai	85.00	62,353,931,459.00

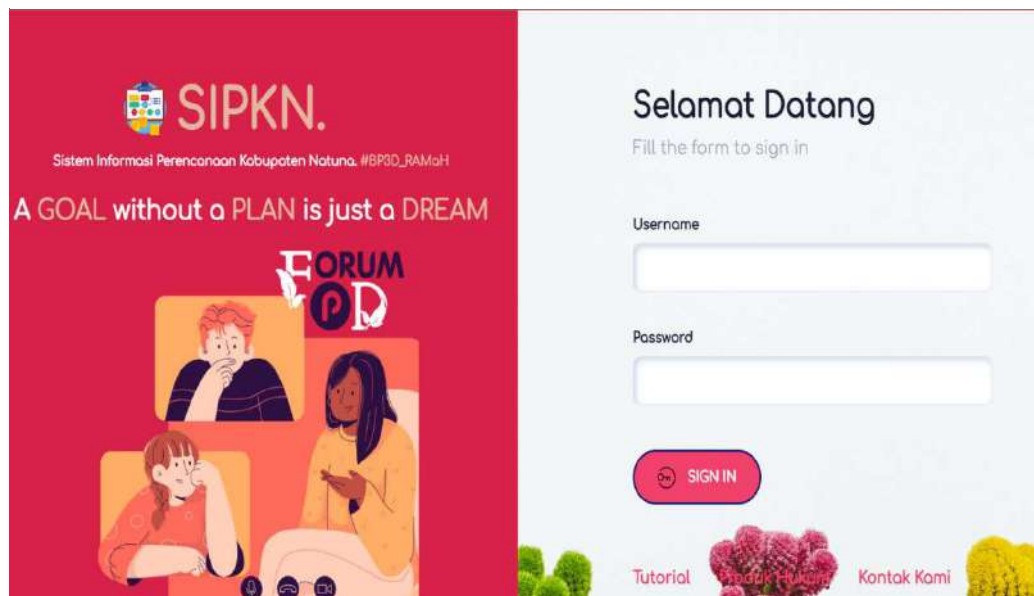
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna telah melaksanakan 4 program utama dengan 12 kegiatan dan 1 program penunjang dengan 8 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten dan APBN. Jumlah anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2024 sebesar Rp.261.647.137.296,- (Dua ratus enam puluh satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang dikembangkan oleh daerah adalah sebagai berikut :

1. **SIPKN** : sistem yang digunakan untuk perencanaan daerah
2. **Infiss Anggaran**: sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah dengan tujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD
3. **Infiss Perbendaharaan**: sistem yang dikembangkan untuk pengelolaan keuangan
4. **SIKEKAH**: sistem yang dikembangkan untuk penatakelolaan Kepegawaiaan
5. **E- Puskesmas**: Aplikasi Rekam Medis Elektronik yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan sebagai salah satu laporan pelayanan kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas)
6. **E-Kejap**: sistem yang dikembangkan untuk evaluasi kinerja OPD

Gambar 2. 2 Aplikasi SIPKN



Gambar 2. 3 Aplikasi Infis Anggaran

25 Login to iNFIS Anggaran Tahun 2025 versi 2025.3.1

Integrated Natuna Financial Information System (iNFIS)

Set Koneksi DB

Versi 2025.3.1

Login :

Password :

Th Anggaran : 2025

Posisi : RAPBD Evaluasi Provinsi

Login Tutup

iNFIS PENGANGGARAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Sistem Elektronik Penyusunan APBD (e-Budgeting)

Mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Gambar 2. 4 Aplikasi E Puskesmas

natuna.epuskesmas.id/login

ePus klaster

Email :

kata kunci :

LOGIN

Compliance Integrated

KABUPATEN NATUNA

Powered By : PT INFOKES INDONESIA

Gambar 2. 5 Aplikasi e Kejap

eKEJAP

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Selamat datang!

Username :

Password :

Tahun : 2024

login

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kesehatan. Penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk pengukuran kinerja dan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*).

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan Indikator yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (a) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya, (b) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50%

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dalam kurun waktu Januari - Desember 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam *balanced scorecard* merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Penetapan indikator kinerja utama dilingkungan pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome). Capaian kinerja indikator utama Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dijabarkan melalui tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TUJUAN :						
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	angka	65.51	66.41	101.39
SASARAN:						
1.1	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Kesakitan	persen	71,76	26.9	81.82
1.2	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Secara Menyeluruh	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0.54	0.29	53.70
		Persentase Puskesmas Yang Meningkatkan Strata Akreditasinya	persen	42.85	42.85	100
1.3	Meningkatnya status kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000KH	366.56	199	72.85
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10.26	14.92	27.29
		Stunting	persen	10.30	10.76	47.46
TUJUAN :						
2	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	NILAI SAKIP	nilai	88.72	76.75	86.61
SASARAN :						
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Nilai LKlJP	nilai	88.72	76.75	86.61
TUJUAN :						
3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	83.0	89.97	108

SASARAN						
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	persen	83.0	89.97	108

Berdasarkan tabel 3.1 diatas diketahui bahwa dari indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Angka Harapan Hidup tahun 2024 sebesar 66,41% sudah melebihi target. Namun jika dibandingkan dengan target AHH nasional, capaian AHH Kabupaten Natuna masih dibawah target nasional sebesar 72,39%.

Tabel selanjutnya ada perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 serta status capaiannya.

Tabel 3. 2 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja (Utama, Program, Kegiatan)	Indikator	Satuan	Target	Capaian	%	Status Capaian	Sumber Data
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	65.51	66.41	101.39	Sangat Baik	BPS
1.1	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit	Angka Kesakitan	Nilai	71.76	26.09	81.82	Cukup	Dinas Kesehatan
	Menurunkan Angka kesakitan akibat DBD	Insiden Rate DBD	Persen	24.27	97.31	401	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita DBD sesuai standar	Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	Persen	100	100	100	Baik	Dinas Kesehatan
	Menurunkan Angka Kesakitan Akibat TB	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB Semua Tipe (Succes Rate)	Persen	99.4	52.06	52	Kurang	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan Pelayanan kesehatan pada suspect TB	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kecamatan dengan cakupan IDL mencapai 80%	Persentase Kecamatan Dengan Idl Pada Bayi Mencapai 80%	Persen	80	85.3	107	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya bayi usia 0 - 11 Bulan yang mendapatkan imunisasi	Persentase Bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	88.9	85.3	96	Baik	Dinas Kesehatan

	dasar lengkap							
	Meningkatnya cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pandu PTM	Persen	57.14	93.33	163	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pasien ODGJ yang dilayani sesuai standar	Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	Persen	100	81.87	82	Cukup	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	Persentase orang dengan diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	Persen	100	97.87	98	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	Persen	100	84	84	Cukup	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kesakitan akibat HIV	Prevalensi HIV	per 100.000	0.3	0.4	133	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan pelayanan kesehatan pada orang yang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	93.46	93	Baik	Dinas Kesehatan
1.2	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0.54	0.29	54	Kurang	Dinas Kesehatan

Secara Menyeluruh								
	Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	101.31	101	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki kartu jaminan kesehatan	Jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	Jiwa	46960	85120	181	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Puskesmas yang melakukan Skrining kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Melakukan Skrining Kesehatan	Persen	100	100	100	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya anak usia pendidikan dasar yang dilayani sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	96.65	97	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya POS UKK dengan Strata yang meningkat	Persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	Persen	8.43	9.2	109	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	82.32	82	Cukup	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	77.59	78	Cukup	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga yang ber PHBS	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persen	33.00	29.42	89	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kecamatan yang memiliki kebijakan promosi kesehatan	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	Persen	100	100	100	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya jumlah	Jumlah Kecamatan yang	Kecamatan	14	15	107	Sangat Baik	Dinas

	kecamatan yang mempunyai forum komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	mempunyai forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat						Kesehatan
	Meningkatnya jumlah posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	120	121	101	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
1.2	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Secara Menyeluruh	Persentase Puskesmas Yang Meningkatkan Strata Akreditasinya	Persen	42.85	42.85	100	Baik	Dinas Kesehatan
	<i>Meningkatnya kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas pelayanan kesehatan yang tersertifikasi akreditasi</i>	<i>Persentase Kecamatan Yang Memiliki Minimal Satu Fasilitas Kesehatan Yang Tersertifikasi Akreditasi</i>	<i>Persen</i>	<i>82.35</i>	<i>100.00</i>	<i>121</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>
	Meningkatnya ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	85	89	105	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Ketersediaan Alkes di pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	39.28	39	Sangat Kurang	Dinas Kesehatan

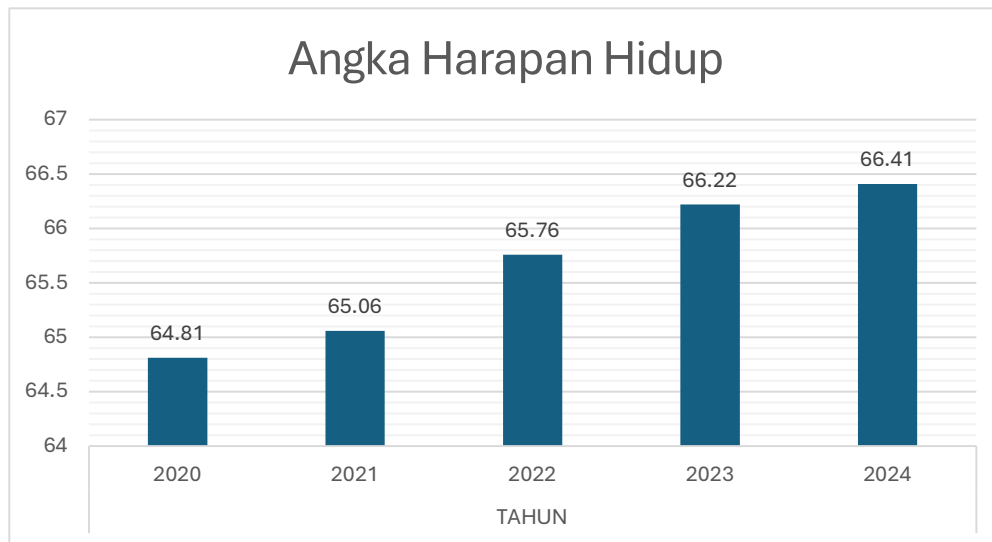
	Meningkatnya Ketersediaan Obat dan BMHP yang memenuhi standar	Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan	Persen	85	93.33	110	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Persen	82.35	100.00	121	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar	Persentase Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar	Persen	100	100	100	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pasien rujukan terlayani sesuai standar	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	Persen	100	100	100	Baik	Dinas Kesehatan
	<i>Meningkatnya Puskesmas Dengan Jenis Tenaga Sesuai Standar</i>	<i>Persentase Puskesmas Dengan Jenis Tenaga Sesuai Standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>Kurang Baik</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>
	Meningkatnya fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	Persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	Persen	100	100	100	Baik	Dinas Kesehatan

	Meningkatnya SDM yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase SDM yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	66.66	67	Cukup	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya SDM yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase SDM yang memiliki sertifikat diklat/kursus	Persen	65	100	154	Sangat Baik	Dinas Kesehatan
1.3	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	10.26	14.92	145.42	Kurang	Dinas Kesehatan
	<i>Meningkatnya cakupan Neonatus yang dilayani sesuai standar</i>	<i>Persentase Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Sesuai Standar</i>	<i>Persen</i>	<i>57.38</i>	<i>100</i>	<i>174</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>
	Meningkatnya bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	88.72	89	Baik	Dinas Kesehatan
1.3	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	366.56	199	72.85	Kurang	Dinas Kesehatan
	<i>Meningkatnya pertolongan persalinan difasilitas kesehatan</i>	<i>Persentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>97.51</i>	<i>98</i>	<i>Baik</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>
	Meningkatnya ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	98.09	98	Baik	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya ibu hamil yang mendapatkan	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	Persen	100	96.42	96	Baik	Dinas Kesehatan

	elayanan kesehatan sesuai standar	<i>kesehatan sesuai standar</i>						
1.3	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	<i>Prevalensi Stunting</i>	Persen	10.3	10.76	104.47	Kurang	Dinas Kesehatan
	<i>Menurunnya cakupan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)</i>	<i>Persentase BBLR</i>	<i>Persen</i>	<i>4.1</i>	<i>9.45</i>	<i>230</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>
	Meningkatnya Ibu hamil KEK mendapat layanan sesuai standar	<i>Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar</i>	Persen	100	100	100	Baik	Dinas Kesehatan
	<i>Meningkatnya Desa/Kelurahan ODF</i>	<i>PERSENTASE DESA/KELURAHAN ODF</i>	<i>Persen</i>	<i>90</i>	<i>29.87</i>	<i>33</i>	<i>Sangat Kurang</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>
	Meningkatnya desa/kelurahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	Persen	90	45.45	51	Kurang	Dinas Kesehatan
	<i>Meningkatnya Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Balita Sehat Dan Balita Sakit</i>	<i>Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pelayanan Balita Sehat Dan Balita Sakit</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>Baik</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>
	Meningkatnya Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	85.66	86	Baik	Dinas Kesehatan
	<i>Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih</i>	<i>Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih</i>	<i>Persen</i>	<i>92.32</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>Sangat Baik</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>
	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	Persen	22262	25795	116	Sangat Baik	Dinas Kesehatan

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa tujuan meningkatkan derajat kesehatan dengan capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup sebesar 66,41% melebihi dari target sebesar 65,51% dengan persentase capaian 101,39% dan kategori sangat baik.

Gambar 3. 1 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2020-2024, didalamnya terdapat indikator daerah yang terkait dengan kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) diartikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. AHH merupakan salah satu indikator dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. AHH ditentukan oleh besarnya jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Biasanya di negara maju harapan hidup tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi, sebaliknya di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

Peningkatan AHH masyarakat kabupaten Natuna dimungkinkan karena beberapa faktor, diantaranya : tercapainya kecamatan dengan imunisasi dasar lengkap pada bayi; tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan terakreditasi; dan meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses air bersih.

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat

Gambar 3. 2 Grafik Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Pada gambar 3.2 dapat dilihat perbandingan 4 (empat) tahun terakhir, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Natuna memiliki tren naik. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Adanya penurunan kasus kematian bayi berkaitan dengan capaian AHH yang meningkat.

Upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan dengan pemberian jaminan kesehatan untuk orang miskin, akreditasi, peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP, pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan

kompetensi SDM, Implementasi PHBS dan Germas di semua sektor dan akselerasi pencapaian kabupaten kota sehat.

Capaian kinerja indikator utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2024 dijabarkan melalui tabel 3.1. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Dari ketiga sasaran strategis tersebut terdapat 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, dengan hasil capaian sebagai berikut:

- 1) Angka Kesakitan sebesar 26,09% dibawah target sebesar 71,76%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 81,82% masuk ke dalam kategori cukup
- 2) Indeks Keluarga Sehat sebesar 0,29 kurang dari target yaitu 0,54 dengan capaian kinerja 53,70% atau dalam kategori kurang
- 3) Persentase Puskesmas Yang Meningkatkan Strata Akreditasinya sebesar 42,85% baik karena sudah sama dengan target sebesar 42,85% dengan capaian kinerja 100% atau dalam kategori baik
- 4) Angka Kematian Ibu, memiliki capaian sebesar 199/100.000 KH dibawah target sebesar 366.56/100.000 KH, dengan persentase capaian kinerja 72.85% masuk ke dalam kategori cukup
- 5) Angka Kematian Bayi sebesar 14,92/1.000 KH melebihi target yaitu 10,26/100.000 KH dengan capaian kinerja 145.42% atau dalam kategori kurang
- 6) Prevalensi Stunting sebesar 10,76% sangat baik karena sudah melampaui target sebesar 10,30% dengan capaian kinerja sebesar 104.47% atau dalam kategori sangat baik
- 7) Nilai LKJIP sebesar 76,5% masih dibawah target sebesar 88,72% dengan capaian kinerja sebesar 86.61%, masuk dalam kategori baik
- 8) Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 89,97% sangat baik karena sudah melampaui target sebesar 83% dengan capaian kinerja sebesar 108% atau dalam kategori sangat baik

Nilai Kepuasan Masyarakat merupakan indikator tujuan untuk meningkatkan tata kelola Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dengan

hasil sangat baik (89,97%) karena sudah melampaui target (83%), dengan hasil capaian kinerja masuk ke dalam kategori baik (108%).

Agar terwujudnya peningkatan birokrasi yang bersih dan akuntabel maka diperlukan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dengan indikator kinerja nilai LKIP. Pada tahun ini diperoleh nilai LKIP sebesar 76,75% masih di bawah target sebesar 88,72% dengan hasil capaian kinerja sebesar 86,61% atau masuk ke kategori baik.

Selanjutnya dalam upaya terwujudnya pelayanan publik yang prima maka diperlukan meningkatkan kualitas pelayanan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Tahun ini, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,97% sangat baik karena sudah melebihi dari target yaitu sebesar 83% dengan capaian kinerja sebesar 108% atau masuk kategori sangat baik.

Dari 3 indikator tujuan dan 8 indikator kinerja sasaran, realisasi terhadap target kinerja tahun 2024, 4 (empat) indikator berkategori baik yaitu 2 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran, 2 (dua) indikator berkategori cukup (indikator sasaran) dan 4 (empat) indikator kategori sangat baik yaitu 1 (satu) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran) serta 1 (satu) indikator kategori kurang (indikator sasaran).

Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Selama 3 Tahun (2023-2024)

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TUJUAN :												
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	64.95	65.76	101.25	65.16	66.22	101.63	65.51	66.42	101.39
SASARAN:												
1.1	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Kesakitan	persen	72.36	64.6	78.55	72.02	59.54	117.3	71.76	26.09	275.05
1.2	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0.22	0.24	109.09	0.43	0.27	62.8	0.54	0.29	53.70

	yang Bermutu dan Secara Menyeluruh	Persentase Puskesmas Yang Meningkatkan Strata Akreditasinya	persen	15.3	15.3	100	28.57	30.77	107.7	42.85	42.85	100
1.3	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	Per 100.000KH	659.8	91.91	186.1	513.1	175.9	165.7	366.56	199	72.85
		Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	11.7	17.46	50.8	10.99	13.19	80	10.26	14.92	145.42
		Prevalensi Stunting	persen	10.5	11.93	86.4	10.4	12.65	78.4	10.3	10.76	104.47
TUJUAN :												
2	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	NILAI SAKIP	nilai	88.48	89.84	82.77	88.56	73.3	82.77	88.72	76.75	86.51
SASARAN :												
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LKIP	nilai	88.48	89.84	82.77	88.56	73.3	82.77	88.72	76.75	86.51

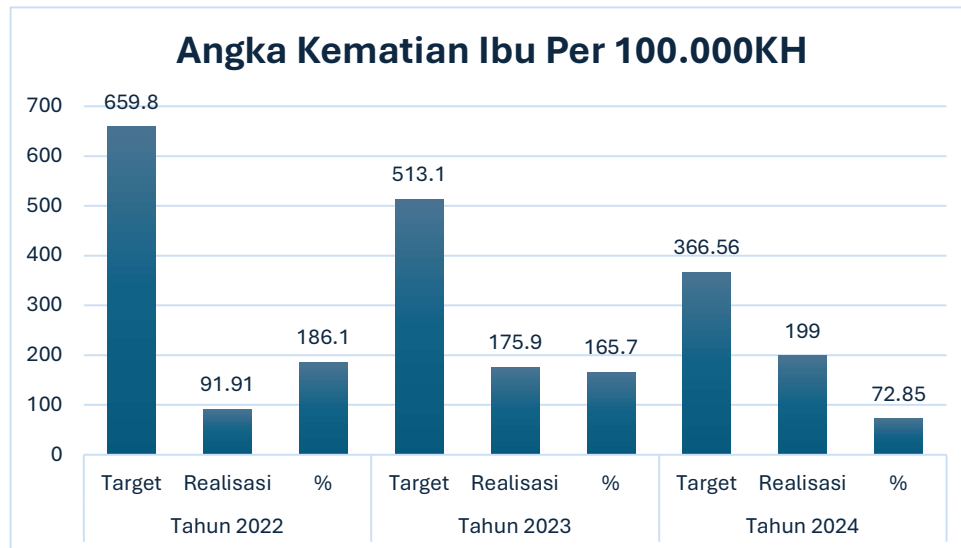
	Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna											
TUJUAN :												
3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen							83	89.97	108
SASARAN												
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	persen	80.1	80.2	100.12	82	85.79	104.62	83	89.97	108

Tabel 3.3 diatas menunjukkan realisasi kinerja tujuan dan sasaran selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada tahun 2022, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah, ada 2 (dua) tujuan Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dan meningkatkan tata kelola organisasi dinas Kesehatan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

Tren AHH selama 3 tahun berturut-turut selalu meningkat. Walaupun angka ini masih diatas rata-rata AHH nasional sebesar 71,6%. Upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan dengan pemberian jaminan kesehatan untuk orang miskin, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP, pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM, implementasi PHBS dan Germas di semua sektor dan akselerasi pencapaian kabupaten kota sehat.

Dari 8 indikator kinerja sasaran menurunnya angka kesakitan dan kematian, semua indikator telah mencapai/melebihi target yang ditentukan. Angka Kematian Ibu apabila dilihat tren per tahun sejak tahun 2022-2024 mengalami penurunan, Dari grafik 3.3 terlihat bahwa trend jumlah kasus kematian ibu maupun capaian AKI mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari 186.1/100.000 KH (1 kasus) meningkat menjadi 72,85/100.000 KH (2 kasus). Pemerintah daerah harus tetap memberikan perhatian yang lebih untuk indikator ini dan saat ini masih menjadi prioritas utama masalah kesehatan di Natuna.

Gambar 3. 3 Grafik Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Natuna tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 diantaranya adalah hipertensi dalam kehamilan, pendarahan serta disebabkan lain-lainnya.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup tahun 2024 sebesar 14,92/1.000 KH lebih baik dari target 10,6/1.000 KH dan AKB tahun 2024 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 13,19/1.000 KH dari target 10,99/1000 KH dan capaian tahun 2022 sebesar 17,46/1.000 KH dari target 11,7/1.000 KH. Beberapa penyebab kematian bayi (neonatal 0-6 hari) tahun 2024 yang dapat diidentifikasi antara lain: Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan congenital, sepsis, dan lain-lain (gangguan nafas, gangguan pencernaan, gangguan kardiovaskuler gangguan saraf dan kecelakaan). Selanjutnya penyebab kematian bayi (29 hari-11 bulan) yaitu: diare, pneumonia, kelainan saluran cerna, kelainan saraf, dan lain-lain yaitu: gangguan nafas, kelainan kongenital, kardiovaskuler, kejang demam, cancer dan kecelakaan. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain: penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan baik sumber daya kesehatan, sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan persalinan dan kesehatan bayi, meningkatnya pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat dalam kesehatan ibu dan bayi, komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan semakin meningkatnya

implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi. Yang menjadi masalah adalah di luar faktor kesehatan yang memerlukan koordinasi peran lintas sektor terhadap penurunan AKB yang tidak bisa dikendalikan dari sisi kesehatan.

Gambar 3. 4 Grafik Angka Kematian Bayi di Kabupaten Natuna
Tahun 2022-2024



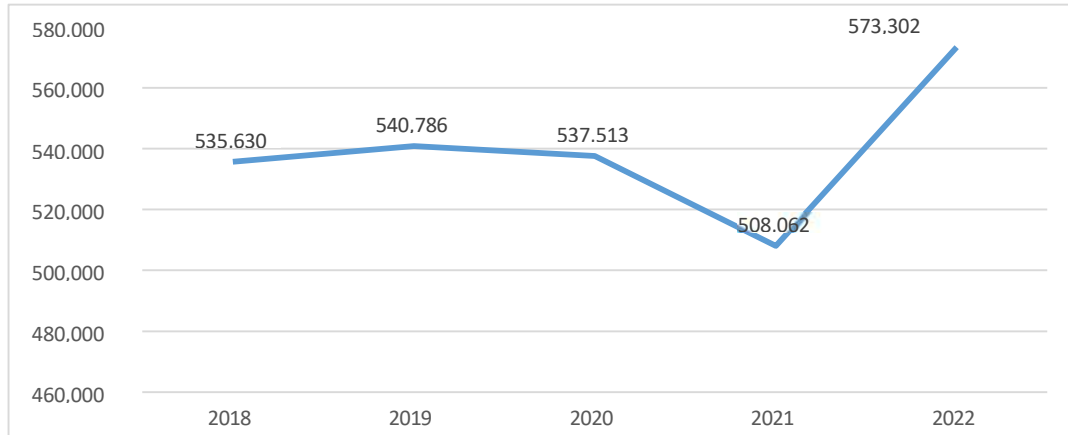
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Dari grafik tren angka kematian bayi dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan AKB dari tahun 2022-2024. Seperti pada kasus kematian bayi, kasus kematian bayi terjadi karena faktor-faktor internal dari sisi kesehatan sudah dapat teratasi. Yang menjadi masalah sekarang adalah di luar faktor kesehatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor terhadap penurunan AKB yang tidak bisa dikendalikan dari sisi kesehatan.

Apabila dilihat dari jumlah kasus kematian ibu, dan bayi dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami penurunan kasus, namun dari perhitungan angka kematian ibu, bayi dan balita terlihat fluktuatif dan cenderung meningkat karena adanya penurunan kelahiran hidup yang digunakan sebagai pembanding/denominator dalam perhitungan angka kematian ibu, bayi maupun balita. Trend kelahiran hidup dapat dilihat pada gambar berikut:

Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular adalah

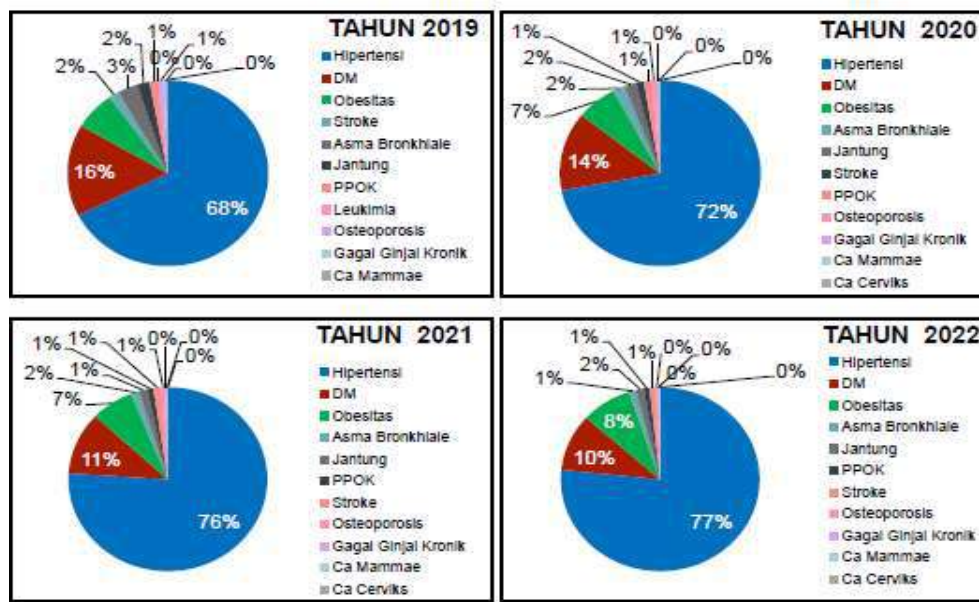
Gambar 3. 5 Grafik Kelahiran Hidup di Natuna Tahun 2018-2022
angka yang menunjukkan rata-rata persentase ketercapaian dari upaya pencegahan



dan pengendalian penyakit menular prioritas. Indikator kinerja ini merupakan indikator komposit yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian kinerja HIV-AIDS, TBC, Malaria dan DBD. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular dapat dilihat pada indikator sasaran Angka Kesakitan. Angka Kesakitan tahun 2024 sebesar 26,09% mengalami penurunan dibanding tahun 2022 dan 2023 dengan capaian indikator kinerja sebesar 275,05%. Capaian tahun 2023 sebesar 59,54% melebihi target 72,02% menurun dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 64,65% kurang dari target 72,36%. Pada tahun 2024 indikator ini tercapai karena adanya penurunan angka kesakitan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.

Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa adalah penderita/ penyandang penyakit tidak menular (PTM) dan kesehatan jiwa (Keswa) yaitu penderita Hipertensi, Diabetis mellitus, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditemukan dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan perhitungan rata-rata prosentase penderita PTM dan Keswa (Hipertensi,DM,ODGJ) yang ditemukan dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart di FKTP.

Capaian kinerja indikator Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Tahun 2024 sebesar



26,09% di bawah target 57% dengan tingkat capaian kinerja 275,05%. Hal ini karena adanya akselerasi kegiatan deteksi dini PTM dalam rangka mendukung pencapaian SPM Kabupaten/Kota yang didanai dari dana dekonsentrasi (APBN).

Gambar 3. 6 Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Natuna

Tahun 2019-2022

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2022

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa adalah penemuan kasus melalui deteksi dini, penatalaksanaan kasus melalui penegakan diagnose dan pengobatan, penguatan surveilans dan penyelidikan epidemiologi, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan penatalaksanaan kasus, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan LS, LSM, OP, Kelompok Sebaya, penguatan jejaring Tim Penanganan Kesehatan Jiwa masyarakat

(TPKJM), pemenuhan sarana deteksi dini (reagensia, TCM, posbindu kit, obat program).

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Kabupaten adalah jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi capaian kinerja persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Kabupaten adalah jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan target yaitu 100%. Indikator ini merupakan indikator yang mendukung Standar Pelayanan Kesehatan Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2019.

Gambar 3. 7 Kondisi Geografis Kabupaten Natuna Tahun 2024



Sumber data <https://natunakab.go.id>

Semua wilayah kabupaten/kota di Natuna merupakan daerah rawan bencana. Selama tahun 2024 telah terjadi bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah penanganan bencana melalui Rapid Health Assessment (RHA), penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Rapid Need Assessment (RNA), penguatan sub klaster kesehatan, pembinaan teknis krisis kesehatan akibat bencana.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar, dapat dilihat pada indikator sasaran Puskesmas yang meningkat strata akreditasinya. Memiliki realisasi capaian kinerja pada tahun ini sebesar 42,85% sesuai target dengan tingkat ketercapaian 100%, meningkat dibandingkan tahun 2023 (30,77%) dan tahun 2022 (15,3%). Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer dan rujukan, pembinaan dan pengawasan fasyankes primer dan rujukan dalam pemenuhan SPA, pendampingan fasyankes primer dan rujukan dalam pelaksanaan akreditasi dan pendampingan dalam proses perizinan fasyankes.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga (PIS PK), merupakan program nasional untuk mencapai Indonesia Sehat. Ada 12 indikator yang telah disepakati dalam Program Indonesia Sehat sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga, yaitu:

1. Keluarga mengikuti KB
2. Ibu hamil melakukan persalinan di faskes
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Balita dilakukan pemantauan pertumbuhan
5. Bayi mendapat ASI eksklusif
6. Penderita TB mendapat pengobatan
7. Penderita Hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa berat mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak merokok

10. Keluarga mendapatkan akses air bersih
11. Keluarga menggunakan jamban sehat
12. Keluarga menjadi anggota JKN

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang merupakan gambaran kesehatan di suatu wilayah. Ada 3 kategori indeks keluarga sehat yaitu: tidak sehat dengan hasil perhitungan 0-0,5, pra sehat dengan hasil perhitungan $>0,5-0,8$ dan kategori sehat dengan hasil perhitungan $>0,8 - 1$.

Capaian kinerja sasaran IKS Kabupaten Natuna tahun 2024 sebesar 0,29 masih di bawah target sebesar 0,54 dengan tingkat capaian 53,70%. Namun lebih baik dibanding tahun 2023 sebesar 0,27 dan tahun 2022 sebesar 0,24 . Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dengan capaian yang rendah, mendorong Puskesmas melakukan kunjungan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Banyak hambatan dalam pelaksanaan PIS PK antara lain ketersediaan dan kualifikasi SDM pada saat melakukan pendekatan keluarga, sarana prasarana, koordinasi dan perilaku masyarakat.

Tabel 3. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022-2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat
Dalam Dokumen Renstra

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2023	% CAPAIAN	TINGKAT KEMAJUAN
Tujuan :					
Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	74.57	74.10	100.63	TERCAPAI
Sasaran :					
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	84.60	81.00	95.74	OPTIMIS TERCAPAI
	Angka Kematian Bayi	7.02	7.80	111.111	TERCAPAI
	Angka Kematian Balita	8.20	10.43	127.20	TERCAPAI
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	89.29	72.00	124.01	TERCAPAI
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	85.08	60.00	141.80	TERCAPAI
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Kabupaten	100.00	100.00	100.00	TERCAPAI

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	63.00	69.00	91.30	OPTIMIS TERCAPAI
	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Kabupaten	0.25	0.32	78.13	PERLU UPAYA KERAS
Tujuan :					
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Nilai Kepuasan Masyarakat	89.75	85.00	105.59	TERCAPAI
sasaran :					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	87.27	80.00	109.09	TERCAPAI
sasaran :					
Meningkatnya kualitas Pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	89.75	85	105.59	TERCAPAI

Tabel diatas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra. Dari 2 (dua) indikator kinerja tujuan semuanya telah tercapai dengan tingkat capaian sesuai dan melebihi target akhir tahun 2023. Dari 10 (sepuluh) indikator sasaran (IKU), 7 (tujuh) indikator telah mencapai target, 2 (dua) indikator optimis tercapai, dan 1 (satu) indikator masih perlu upaya keras dalam pencapaiannya.

Tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran menurunnya angka kesakitan dan kematian mempunyai 8 indikator sasaran dengan capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2023 sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu, capaian kinerja 84,60/100.000 KH belum mencapai target 81/100.000 KH, prosentase capaian terhadap target 2023 sebesar 95,74%. Target indikator ini optimis akan tercapai pada akhir tahun 2023. Strategi akselerasi penurunan AKI yaitu:
 - a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan pendekatan Kontinum of Care dan pemanfaatan buku KIA
 - b. Peningkatan program KB dengan menggunakan metode MKJP dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu di Puskesmas
 - c. Penguatan Deteksi dini Ibu hamil dan Intervensi kegiatan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Penguatan Antenatal (K6) dan Persalinan oleh Nakes
 - d. Penguatan PONEK, PONEK dan Jejaring Rujukan
 - e. Penguatan pemberdayaan masyarakat (posyandu, optimalisasi germas, implementasi 5Ng, pemanfaatan dana desa untuk kesehatan, perluasan desa siaga dengan penyediaan ambulance desa dan tabungan ibu bersalin)
2. Angka Kematian Bayi, capaian kinerja 7,02/1.000 KH lebih baik dari target 7,80/1.000 KH, prosentase capaian terhadap target akhir 2023 sebesar 111,11%. Target akhir 2023 indikator AKB telah tercapai.
3. Angka Kematian Balita, capaian kinerja 8,20/1.000 KH lebih baik dari target 10,43/1.000 KH, prosentase capaian kinerja terhadap target 2023 sebesar 127,20%. Target inidkator ini sudah tercapai dan jauh melebihi target akhir tahun 2023.

4. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, capaian kinerja 89,29% melebihi target 72%, prosentase capaian kinerja terhadap target 2023 sebesar 124,01%. Capaian ini sudah tercapai dan melebihi target akhir tahun 2023 sehingga pada RKPD Perubahan 2022 target diperbaharui menjadi 85%.
5. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, capaian kinerja 85,08% melebihi target akhir 2023 sebesar 60%, prosentase capaian kinerja terhadap target akhir 2023 sebesar 141,8%. Capaian kinerja indikator ini sudah tercapai dan melebihi target akhir 2023.
6. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Kabupaten , capaian kinerja 100% sesuai target akhir tahun 2023 sebesar 100%, prosentase capaian kinerja terhadap akhir tahun 2023 sebesar 100% sudah tercapai.
7. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan, capaian kinerja 63% kurang dari target akhir RPJMD sebesar 69%, persentase capaian kinerja terhadap akhir tahun 2023 sebesar 91,30%. Target ini optimis tercapai pada akhir tahun 2023. Strategi pencapaian indikator ini adalah:
 - a. Penguatan SDM Puskesmas
 - b. Pendampingan ke Kab/Kota dalam pemenuhan Sarana Prasarana Alat (SPA)
 - c. Penguatan transformasi teknologi informasi kesehatan
 - d. Peningkatan pembinaan akreditasi utk peningkatan mutu pelayanan
8. Indeks Keluarga Sehat, capaian kinerja 0,25% masih dibawah target akhir RPJMD 2023 sebesar 0,32%. Prosentase capaian kinerja terhadap target akhir 2023 sebesar 78,13%. Masih perlu upaya keras untuk mencapai target akhir tahun 2023.

Strategi untuk pencapaian indikator ini adalah:

- a. Intervensi lanjut terintegrasi lintas program
- b. Update data hasil intervensi lanjut di aplikasi KS 2.0
- c. IKS menjadi indikator kinerja dinas kesehatan dan masuk dalam indikator penilaian kinerja Puskesmas

Sedangkan capaian indikator tujuan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja 89,75 melebihi target 85, persentase capaian kinerja terhadap target akhir 2023 sebesar 105,59%. Capaian kinerja indikator ini sampai akhir tahun 2023 sudah tercapai dan melebihi target akhir 2023. Ada 2 sasaran pada tujuan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator Nilai SAKIP, capaian kinerja 87,27 lebih tinggi dari target akhir tahun 2023 sebesar 80, persentase capaian kinerja dibandingkan target sampai akhir tahun 2023 sebesar 109,09% telah mencapai dan melebihi target akhir tahun 2023.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator kinerja Nilai kepuasan masyarakat capaian kinerja 89,75 melebihi target 85, persentase capaian kinerja terhadap target akhir 2023 sebesar 105,59%. Capaian kinerja indikator ini sampai akhir tahun 2023 sudah tercapai dan melebihi target akhir 2023

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
Tujuan :				
Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	74.57	71.85	103.81
Sasaran :				
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	84.60	183.00 (th 2024)	181,42
	Angka Kematian Bayi	7.02	14.00	167,27
	Angka Kematian Balita	8.20		
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	89.29		
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	85.08		
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Kabupaten	100.00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	63.00		
	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Kabupaten	0.25	0.189	132.28

Tujuan :				
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Nilai Kepuasan Masyarakat	89.75		
sasaran :				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	87.27		
sasaran :				
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	89.75		

Dari 2 indikator tujuan dan 10 indikator sasaran, hanya ada 4 (empat) indikator yang mempunyai target nasional yaitu:

1. Angka Harapan Hidup, capaian tahun 2022 sebesar 74,57 jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2025 sebesar 71,85, sudah melebihi target nasional dengan persentase capaian 103,81%
2. Angka Kematian Ibu, capaian tahun 2022 sebesar 84.60/100.000 KH, jika dibandingkan target nasional 2024 sebesar 183/100.000 KH sudah jauh lebih baik dari target nasional. Persentase capaian terhadap target nasional sebesar 216,31%
3. Angka Kematian Bayi, capaian tahun 2022 sebesar 7,02/1.000 KH jika dibandingkan dengan target nasional AKB tahun 2022 sebesar 14/1.000 KH maka capaian AKB Natuna sudah melebihi target nasional. Persentase capaian AKB terhadap target nasional sebesar 199,43%.
4. Indeks Keluarga Sehat, capaian 0,20 jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 0,189, maka target IKS Natuna sudah melebihi target nasional. Persentase capaian sebesar 132,28% melebihi target nasional.

Tabel 3. 6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	CAPAI AN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Tujuan:						
Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	74.59	74.57	99.97	Tahun 2024 jumlah kematian bayi meningkat. AHH ditentukan oleh besarnya jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama adalah pola makan, penyakit bawaan/ kongenital, penyakit degeneratif, dan lingkungan tempat tinggal tingkat Kesehatan ibu dan bayi yang rendah karena buruknya tingkat Kesehatan.	Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan bagi usia produktif, ibu, bayi dan balita dengan pemberian jaminan kesehatan untuk orang miskin, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP, pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM, implementasi PHBS dan Germas di semua sektor dan akselerasi pencapaian

						kabupaten kota sehat
Sasaran :						
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	120.00	84.60	141.84	Akselerasi penurunan AKI dengan strategi: a) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan pendekatan Kontinum of Care dan pemanfaatan buku KIA	

					b) Peningkatan program KB dengan menggunakan metode MKJP dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu di Puskesmas c) Penguatan Deteksi dini Ibu hamil dan Intervensi kegiatan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Penguatan Antenatal (K6) dan Persalinan oleh Nakes d) Penguatan PONED, PONEK dan Jejaring Rujukan e) Penguatan Pemberdayaan masyarakat (posyandu, optimalisasi germas, implementasi 5Ng, pemanfaatan dana desa untuk kesehatan, perluasan desa siaga dengan	
--	--	--	--	--	---	--

					penyediaan ambulance desa dan tabungan ibu bersalin)	
	Angka Kematian Bayi	7.90	7.02	112.54		
	Angka Kematian Balita	10.45	8.20	127.44		
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit menular	85.00	89.29	105.05		
	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan	57.00	85.08	149.26	Intensifnya kegiatan deteksi dini fr PTM di lapangan melalui posbindu. Pemeriksaan PTM mendorong pencapaian SPM kab/kota.	

	Kesehatan Jiwa					
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana kabupaten	100.00	100.00	100.00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	63.00	63.00	100.00		
	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Kabupaten	0.20	0.25	125.00	1. Puskesmas sudah melakukan intervensi lanjut terintegrasi lintas program 2. Puskesmas sudah melakukan update data hasil intervensi	

					lanjut di aplikasi KS 2.0 3. Adanya dukungan dana dari pemerintah pusat (BOK) maupun APBD 4. Beberapa kabupaten/kota menja IKS menjadi indikator kinerja dinas kesehatan dan masuk dalam indikator penilaian kinerja Puskesmas	
Tujuan :						
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Nilai Kepuasan Masyarakat	85.00	89,75	105.59		
Sasaran :						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	87.00	87.27	100.31		
Sasaran :						

Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat	85.00	89,75	105.59		
---------------------------------------	------------------------------	-------	-------	--------	--	--

Dari 2 indikator tujuan dan 8 indikator kinerja sasaran, 1 indikator tujuan tidak tercapai yaitu AHH. Pencapaian target AHH dan peningkatan kasus kematian bayi sangat berkaitan karena AHH ditentukan oleh besarnya jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi tinggi/meningkat maka AHH akan rendah. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama adalah pola makan, penyakit bawaan/kongenital, penyakit degenerative, dan lingkungan tempat tinggal dan tingkat Kesehatan ibu dan bayi yang rendah karena buruknya tingkat Kesehatan. 1 indikator tujuan dan 7 indikator sasaran telah mencapai/melebihi target yang ditentukan.

Jumlah kematian bayi Tahun 2022 sebanyak 4.024 kasus meningkat dibandingkan tahun 2021 sebanyak 3.997 kasus. Penyebab kematian bayi (neonatal umur 0-28 hari) yang dapat diidentifikasi antara lain: Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (38%), asfiksia (27%) kelainan kongenital 16%, sepsis (3%) dan lain-lain 14% (gangguan nafas, gangguan pencernaan, gangguan kardiovaskuler gangguan saraf dan kecelakaan). Penyebab kematian bayi (29 hari-11 bulan) yaitu: diare (13%), pneumonia (9%), kelainan saluran cerna (6%), kelainan saraf (6%), covid (3%) dan lain-lain (63%) yaitu: gangguan nafas (18%), kelainan congenital (18%), kardiovaskuler (15%), kejang demam (10%), cancer dan kecelakaan. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain: penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan baik sumber daya kesehatan, sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan persalinan dan kesehatan bayi, meningkatnya pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat dalam kesehatan ibu dan bayi, komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan semakin meningkatnya implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi

Tabel 3. 7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TUJUAN/ SASARAN / INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %	
Tujuan:	Meningkatkan derajat kesehatan							
Angka Harapan Hidup	74.59	74.57	99.97	677,130,714,000	662,666,363,780	97,86	2.14	
Sasaran :	Menurunnya angka kesakitan dan kematian							
Angka Kematian Ibu	120.00	100.87	118.97	4,225,531,000	3,713,219,093	87,88	12,12	
Angka Kematian Bayi	7.90	8.37	94.38					
Angka Kematian Balita	10.45	9.77	106.96	394,947,000	358,676,830	90,82	9,18	
Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	85.00	89.29	105.05	1,044,826,000	984,847,295	94,26	5,74	
Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	57.00	85.08	149.26	981,490,000	917,908,988	93,52	6,48	
Persentase pelayanan kesehatan bagi	100.00	100.00	100.00	2,198,639,000	1,862,716,819	84.72	15.28	

penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Kabupaten							
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	63.00	63.00	100.00	516,677,272,000	506,556,297,814	98.04	1.96
Indeks Keluarga Sehat Wilayah Kabupaten	0.20	0.25	125.00	13,011,006,000	12,577,095,776	96.67	3.33
Tujuan :	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna						
Nilai Kepuasan Masyarakat	85.50	89.75	104.97	37,789,834,000	36,331,642,958	96.14	3.86
sasaran :	Meningkatnya akuntabilitas kinerja						
Nilai SAKIP	87.00	87.27	100.31	99,764,509,000	98,358,266,307	98.62	1.38

sasaran :	Meningkatnya kualitas pelayanan						
Nilai Kepuasan Masyarakat	85.50	89.75	104.97	37,789,834,000	36,331,642,958	96.14	3.86

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp.677.130.714.000,00 realisasi Rp.661.639.095,200 (97,71%). Alokasi tersebut digunakan untuk pencapaian target indikator sebagai berikut:

1. AHH: anggaran untuk pencapaian target AHH sebesar Rp.677.130.714.000,00 realisasi Rp.661.639.095.200,00 (97,71%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.14.464.350.220,00 (2,14%)
2. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi: anggaran untuk pencapaian target AKI dan AKB sebesar Rp. 4.225.531.000,00 realisasi Rp.3.713.219.093,00 (87,88%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.512.311.907,00 (12,12%)
3. Angka kematian balita: anggaran untuk pencapaian target AKABA sebesar Rp.981.490.000,00 realisasi Rp.917.908.988,00 (90,82%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.169.186.670,00 (9,18%). Adanya kegiatan yang dilakukan secara daring dan efisiensi honor narasumber.
4. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular: anggaran untuk pencapaian target sebesar Rp.1.044.826.000,00 realisasi Rp.984.847.295,00 (94,26%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.59.978.705,00 (5,74%)
5. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa: anggaran untuk pencapaian target sebesar Rp.981.490.000,00 realisasi Rp.917.908.988,00 (93,52%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.63.581.012,00 (6,48%).
6. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Kabupaten : anggaran untuk pencapaian target sebesar Rp.2.198.639.000,00 realisasi Rp.1.862.716.819,00 (84,72%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.335.922.181,00 (15,28%). Hal ini karena intensifikasi penyelidikan dan penanggulangan Covid-19 menyesuaikan kasus Covid yang sudah menurun secara signifikan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang banyak dilakukan secara daring sehingga anggaran lebih efisien

7. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan: anggaran untuk pencapaian target sebesar Rp.516.677.272.000,00 realisasi Rp.506.556.297.814,00 (98,04%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.10.120.974.186,00 (1,96%)
8. Indeks Keluarga Sehat Wilayah Kabupaten : anggaran untuk pencapaian target IKS sebesar Rp.13.011.006.000,00 realisasi Rp.12.577.095.776,00 (96,67%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.433.910.224,00 (3,33%)
9. Nilai Kepuasan Masyarakat: anggaran untuk pencapaian target AKABA sebesar Rp.37.789.834.000,00 realisasi Rp.36.331.642.958,00 (96,14%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.458.191.042,00 (3,86%)
10. Nilai SAKIP: anggaran untuk pencapaian target Nilai SAKIP sebesar Rp.99.764.509.000,00 realisasi Rp.98.358.266.307,00 (98,62%), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.406.242.693,00 (1,38%)

Tabel 3. 8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja (Tahun 2024)		Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4		5		6
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	88.64	140,000,000	76.75	155,080,676	Tidak Menunjang
Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	140,000,000	75	155,080,676	Menunjang

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	70,000,000	2	23,448,000	
Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70,000,000	2	131,632,676	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP	Persen	80	76,175,193,98₃	83	94,816,065,79₆	Menunjang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	62,398,724,38₂	1	93,602,141,30₈	Menunjang
Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	Orang/bulan	494	62,398,724,38 ₂	889	93,602,141,30 ₈	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	75	225,000,000	75	0	Menunjang
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	150,000,000	0	0	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	75,000,000	0	0	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	100,000,000	1	0	Menunjang
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	100,000,000	0	0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	625,000,000	100	43,905,488	Menunjang
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	400	150,000,000	0	0	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	75,000,000	0	0	

Koordinasidan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	75,000,000	0	0	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	100,000,000	1	5,154,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	28	75,000,000	0	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	150,000,000	3	38,751,488	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	1,107,000,000	75	346,377,881	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	87,000,000	26	39,212,500	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28	310,000,000	38	6,409,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	120,000,000	2	13,511,600	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	100,000,000	12	7,783,250	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	20,000,000	0	0	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	18	40,000,000	20	40,893,900	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	118	420,000,000	100	238,567,631	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	5,000,000	0	0	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	976,400,000	69	57,966,990	Menunjang

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	650,000,000	0	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	114	101,400,000	12	14,066,990	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	54	155,000,000	35	43,900,000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	70,000,000	0	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	10,393,069,601	75	599,841,896	Menunjang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	15,000,000	1	4,950,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	144,000,001	4	5,919,500	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	10,234,069,600	1	588,972,396	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	63	350,000,000	66	165,832,233	Menunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	300,000,000	7	147,752,233	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	30,000,000	0	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	20,000,000	2	18,080,000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	Persen	26.5	333,000,000	97.31	48,306,200	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP	Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	Persen	100	333,000,000	100	48,306,200	Menunjang

Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	333,000,000	1	48,306,200	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Laporan LKJiP	Persen	88.64	350,000,000	76.75	60,081,250	Menunjang
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	Dokumen	1	350,000,000	1	60,081,250	Menunjang
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	350,000,000	1	60,081,250	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase BBLR	Persen	4.6	1,100,000,000	9.45	276,272,600	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP	Persentase ibu hamil dengan KEK	Persen	100	1,100,000,000	100	276,272,600	Menunjang

Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mendapat layanan sesuai standar						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1,100,000,000	1	276,272,600	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan ODF	Persen	80	735,000,000	29.87	48,428,912	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	Persen	80	735,000,000	45.45	48,428,912	Menunjang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	735,000,000	1	48,428,912	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	Persen	99.4	461,000,000	81.97	8,026,000	Menunjang

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	461,000,000	34.39	8,026,000	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	525	461,000,000	791	8,026,000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	Persen	73.3	519,400,000	85.3	49,857,665	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	87.8	519,400,000	85.3	49,857,665	Menunjang
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	519,400,000	1	49,857,665	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas	Persen	93.33	33,130,230,000	100	13,283,797,995	Menunjang

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	kesehatan yang tersertifikasi akreditasi						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	45	2,407,300,000	39.28	251,029,546	Menunjang
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	7200	2,127,300,000	7154	186,813,400	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	18	280,000,000	41	64,216,146	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	71	25,305,200,000	89	8,816,748,241	Menunjang
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	15,000,000,000	2	8,280,869,850	

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	3,455,200,000	0	0	
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	1	2,400,000,000	0	0	
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	5	2,250,000,000	7	392,733,686	
Rehabilitasidan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasidan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	2,000,000,000	1	143,144,705	
Rehabilitasidan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasidan Pemeliharaan	Unit	2	200,000,000	0	0	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP	Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan	Persen	80	3,300,000,000	93.33	3,691,925,809	Menunjang

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	3,300,000,000	1	3,691,925,809	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Puskesmas	86.6	905,000,000	100	305,114,079	Menunjang
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasidi Kabupaten/Kota	Unit	13	905,000,000	15	305,114,079	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar	Persen	100	445,000,000	100	102,720,320	Menunjang
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi	Unit	1	445,000,000	1	102,720,320	

Darurat Terpadu (SPGDT)	Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						
Penerbitan Izin RumahSakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	Persen	80	767,730,000	100	116,260,000	Menunjang
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	767,730,000	1	116,260,000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	13,773,460,000	101.31	12,170,056,340	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	46850	13,773,460,000	85120	12,170,056,340	Menunjang

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	13,773,460,000	1	12,170,056,340	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase KK yang sudah diverifikasi	Persen	92.89	191,000,000	0	0	Tidak Menunjang
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluarga yang diverifikasi	Indeks	16713	191,000,000	0	0	Tidak Menunjang
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan	Unit	16713	191,000,000	0	0	

	kapasitas pelayanan rumah sakit						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	Persen	40.25	589,000,000	100	209,244,468	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	589,000,000	88.72	209,244,468	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1300	589,000,000	1005	209,244,468	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien Covid 19 yang dilakukan Treatment (Perawatan) sesuai Standar	Persen	100	300,000,000	0	0	Tidak Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase Kasus Terkonfirmasi Covid 19	Persen	5.1	300,000,000	0	0	Tidak Menunjang

Daerah Kabupaten/Kota							
Pelaksanaan Kewaspadaan Dinidan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dinidan Respon Wabah	Dokumen	1	300,000,000	0	0	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan difasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	1,931,063,000	97.61	661,115,100	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	941,448,000	98.09	285,372,100	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1614	941,448,000	981	285,372,100	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	989,615,000	96.42	375,743,000	Menunjang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1611	989,615,000	960	375,743,000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	Persen	100	2,882,407,000	100	587,803,577	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	880,000,000	96.65	207,357,814	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14218	880,000,000	15374	207,357,814	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	Persen	5.63	250,000,000	9.2	57,664,400	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	250,000,000	1	57,664,400	

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	1,327,407,000	82.32	113,952,200	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	58920	1,327,407,000	43960	113,952,200	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	425,000,000	77.59	208,829,163	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5888	425,000,000	5429	208,829,163	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	Persen	42.9	1,534,847,100	93.33	384,063,888	Menunjang

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	Persen	100	507,615,700	82	78,338,588	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	136	507,615,700	155	78,338,588	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	Persen	100	541,115,700	97.87	268,496,900	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1238	541,115,700	1374	268,496,900	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	Persen	100	486,115,700	84	37,228,400	Menunjang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18286	486,115,700	8496	37,228,400	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	Persen	100	705,000,000	100	67,253,180	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	705,000,000	85.66	67,253,180	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4635	705,000,000	4670	67,253,180	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	64.28	196,000,000	0	0	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas	9	196,000,000	0	0	Menunjang

Daerah Kabupaten/Kota							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	196,000,000	0	0	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	Persen	88.35	1,135,000,000	100	318,933,440	Menunjang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	Rumah Tangga	22262	1,135,000,000	25795	318,933,440	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1,135,000,000	1	318,933,440	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Prevalensi HIV	Persen	0.3	311,500,000	0.4	0	Menunjang

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	311,500,000	93.46	0	Menunjang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1802	311,500,000	2043	0	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	Persen	93.3	2,017,570,000	60	987,916,562	Menunjang
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	Faskes	100	60,000,000	100	19,010,150	Menunjang
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan	Dokumen	49	60,000,000	26	19,010,150	

Praktik Tenaga Kesehatan	Praktik Tenaga Kesehatan						
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memenuhi standar difasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	180,000,000	60	60,491,384	Menunjang
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	783	180,000,000	911	60,491,384	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memiliki sertifikat diklat/kursus	Persen	60	1,777,570,000	0	908,415,028	Menunjang
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	18	1,777,570,000	204	908,415,028	

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	Persen	58.55	662,900,000	47.9	184,773,350	Menunjang
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memiliki sertifikat higiene sanitasi	Persen	58.55	450,000,000	85.67	43,503,850	Menunjang
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	450,000,000	1	43,503,850	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi	Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat	IRTP	400	212,900,000	467	141,269,500	Menunjang

dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	74	212,900,000	80	141,269,500	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	30	704,000,000	29.42	401,439,250	Menunjang
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	Persen	60	254,000,000	100	78,334,250	Menunjang
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	254,000,000	1	78,334,250	

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mempunyai forum KomunikasiGerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kecamatan	7	200,000,000	15	163,688,800	Menunjang
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	200,000,000	1	163,688,800	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Aktif	UKBM	70	250,000,000	121	159,416,200	Menunjang
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	250,000,000	1	159,416,200	

Tabel 3.8 menunjukkan program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja. Indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung kinerja sasaran:

1. Angka Kematian Ibu, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten . Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator AKI adalah: Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu bersalin sesuai standar minimal sebesar 95 %, persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu hamil sesuai standar minimal sebesar 95%, persentase Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60%, persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5%.
2. Angka Kematian Bayi, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten . Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator AKB adalah: Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi, persentase pelayanan bayi yang dilayani sesuai standar minimal 90%, persentase UCI desa.
3. Angka Kematian Balita, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten . Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator AKABA adalah: Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita, persentase pelayanan balita yang dilayani sesuai standar minimal 90%, persentase Kab/Kota dengan prevalensi gizi buruk $< 0,05\%$.
4. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten . Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase

kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular, Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular, Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

5. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten . Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan keswa Napza, Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Dinas Kabupaten Natuna
6. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Kabupaten , indikator ini didukung oleh program Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten . Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/Bencana < 24 jam.
7. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan indikator ini didukung oleh 3 program yaitu:
 - a. Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu, Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan, Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan, Presentase

Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi, presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS.

- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya.
 - c. Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan minuman pada kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan, Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.
8. Indeks Keluarga Sehat Wilayah Kabupaten, indikator sasaran ini didukung oleh 2 program yaitu:
- a. Pemenuhan UKP dan UKM/ Pemenuhan layanan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten. Indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah: Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga baik
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, pada kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten, dengan indikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri, Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan, Persentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitas teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Natuna. Semua indikator dalam program dan kegiatan menunjang tercapainya kinerja indikator sasaran Dinas Kesehatan.

3.2 Realisasi Anggaran Dan Pendapatan

Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2022/24 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Natuna Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Dinas Kesehatan	677.130.714.000	662.666.363.780	97,86
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	137.554.343.000	134.689.909.265	97,92
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	705.184.000	657.078.925	93,18
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	314.134.000	303.000.125	96,46
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	391.050.000	354.078.800	90,55
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.059.325.000	97.728.187.382	98,66
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86.569.325.000	85.340.223.944	98,58
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.100.000.000	12.001.995.353	99,19
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	228.389.000	226.220.710	99,05
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	161.611.000	159.747.375	98,85
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	440.000.000	432.402.055	98,27
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	196.774.689	98,39
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	240.000.000	235.627.366	98,18
	Administrasi Kepegawaian	655.000.000	618.114.653	94,37

	Perangkat Daerah			
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	255.000.000	231.748.853	90,88
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000	386.365.800	96,59
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.001.259.000	9.756.718.157	97,55
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	502.970.000	499.401.715	99,29
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.350.000.000	1.323.166.816	98,01
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	791.770.000	786.655.376	99,35
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.180.543.000	2.073.570.786	95,09
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	951.000.000	903.761.500	95,03
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.500.000	28.482.116	96,55
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.252.176.000	1.249.377.295	99,78
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.951.500.000	1.941.608.087	99,49
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	991.800.000	950.694.466	95,86
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.284.750.000	2.095.438.512	91,71
1	Pengadaan Mebel	50.000.000	47.907.000	95,81
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	919.000.000	835.953.443	90,96
3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	44.451.000	88,90
4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	419.500.000	378.884.350	90,32
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	846.250.000	788.242.719	93,15

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna pada tahun anggaran 2024, didukung dengan anggaran APBD(P) Kabupaten Rp.677.130.714.000,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Realisasi anggaran APBD(P) sebesar Rp.662.666.363.780,- (97,86%) dan realisasi fisik 100%. Ada efisiensi anggaran APBD sebesar 14.464.350.220,- (2,14%). Alokasi APBN sebesar Rp.25.858.048.000,- (Dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) realisasi Rp.20.358.421.637,- (78,73%) dan realisasi fisik 100%.

Ada penurunan anggaran APBD Kabupaten untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Alokasi anggaran tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dari Rp.784.451.969.000,- menjadi Rp.677.130.714.000,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp.107.321.255.000,- (15,85%). Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.677.130.714.000,- digunakan untuk urusan wajib sebesar Rp.539.576.371.000,- dan non urusan sebesar Rp.137.554.343.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.662.666.363.780,- (97,86%) lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar Rp.689.690.677.882,- (87,92%) sedangkan realisasi fisik 100% meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 99,91%.

Pendapatan Dinas Kesehatan tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.21.600.000.000,- dan berhasil memberikan pendapatan sebesar Rp.25.944.042.674,00. Realisasi pendapatan melebihi target dengan capaian 120,11%. Ada kelebihan pendapatan sebesar Rp.4.344.042.674,00.

3.3 Capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Indeks kesehatan adalah ukuran kualitas hidup yang didasarkan pada dimensi kesehatan. Indeks ini dapat diukur di tingkat pemerintah daerah, regional, dan nasional. Indeks kesehatan dapat digunakan untuk membandingkan kesehatan antar wilayah geografis; membandingkan kesehatan antar topik kesehatan; membandingkan kesehatan antar wilayah geografis dan topik kesehatan dari waktu ke waktu; dan mengelompokkan wilayah berdasarkan klasifikasi indeks kesehatan. Indeks kesehatan dapat dihitung berdasarkan berbagai indikator kesehatan seperti Angka harapan hidup; Morbiditas atau angka kesakitan penduduk; Rata-rata lama sakit; Status gizi; dan Mortalitas atau kematian. Indeks kesehatan juga dapat

diukur berdasarkan kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan, dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah atau penyakit. Tabel 3.10 di bawah ini menjelaskan capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Natuna.

Tabel 3. 10 Indeks Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2022, 2023 dan 2024

Indikator	Satuan	2022				2023				2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Status	Target	Realisasi	Capaian	Status	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesehatan	Indeks	0.69	0.704	100.00	Sangat Tinggi	0.69	0.711	100.00	Sangat Tinggi	0.70	0.69	98.57

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dilihat bahwa Indeks Kesehatan menunjukkan penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan capaian 98.57%. Namun untuk penentuan target tiap tahunnya menjadi 0.70 pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya upaya untuk terus meningkatkan standar kesehatan. Dengan status capaian "Sangat Tinggi" pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat berada pada level yang sangat baik.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan capaian indeks kesehatan pada tahun 2024. Tabel 3.11 di bawah ini menjelaskan faktor Penghambat dan faktor pendukung terkait pencapaian indeks kesehatan.

Tabel 3. 11 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Indeks Kesehatan
Kabupaten Natuna Tahun 2024

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
- Akses terhadap layanan kesehatan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas yang sudah tersebar di 15 kecamatan, meskipun 2 kecamatan belum ada Puskesmas namun masih bisa dicover oleh kecamatan induk. - Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Natuna juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan - Kualitas lingkungan yang cukup memadai seperti ketersediaan air bersih.	- Adanya kesenjangan akses layanan kesehatan, masyarakat yang berada dipulau terpencil sulit menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai khususnya bersifat spesialistik, distribusi tenaga medis dan paramedis belum merata diseluruh pulau-pulau yang ada, masih adanya penumpukan disalah satu fasilitas kesehatan di daerah perkotaan. - Faktor cuaca ekstrim di waktu-waktu tertentu juga merupakan tantangan bagi masyarakat dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. - Tingginya Angka Kesakitan diakibatkan penyakit menular diantaranya penyakit TB dan Demam Berdarah, serta penyakit tidak menular salah satunya hipertensi yang tiga tahun berturut turut menempati posisi pertama di 10 penyakit terbanyak

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran tahun 2024, dari 2 (dua) indikator tujuan dan 10 (sepuluh) indikator sasaran, 1 (satu) indikator tujuan dengan hasil baik yaitu AHH dan 1 (satu) indikator dengan hasil sangat baik yaitu indeks kepuasan masyarakat. Dari 10 (sepuluh) indikator sasaran, 3 (tiga) indikator dengan hasil baik dan 7 (tujuh) indikator dengan hasil sangat baik.
2. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu semua indikator tujuan dan sasaran meningkat capaiannya.
3. Dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra, semua indikator tujuan telah melebihi target akhir 2024, 2 (dua) indikator sasaran optimis tercapai yaitu AKI dan persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan dan 1 (satu) indikator perlu upaya keras dalam mencapainya yaitu indeks keluarga sehat.
4. Dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional yaitu AHH, AKI, AKB dan IKS. Semua indikator telah melebihi target nasional.
5. Hasil dari analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, ada 1 (satu) indikator tujuan yang tidak tercapai yaitu AHH dan 3 (tiga) indikator dengan

persentase capaian lebih dari 120% yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan jiwa, dan indeks keluarga sehat wilayah Kabupaten.

6. Hasil dari analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, semua indikator kinerja secara fisik kegiatan tercapai 100%, secara capaian kinerja hanya 1 (satu) yang belum mencapai target dan semua indikator terdapat efisiensi anggaran.
7. Hasil dari analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, bahwa semua indikator kesehatan yang disusun telah menunjang capaian kinerja tujuan dan sasaran.
8. Realisasi anggaran dan pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2024 alokasi anggaran APBD(P) Kabupaten Rp.677.130.714.000,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Realisasi anggaran APBD(P) sebesar Rp.662.666.363.780,- (97,86%) dan realisasi fisik 100%. Ada efisiensi anggaran APBD sebesar 14.464.350.220,- (2,14%). Pendapatan Dinas Kesehatan tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.21.600.000.000,- dan berhasil memberikan pendapatan sebesar Rp.25.944.042.674,00. Realisasi pendapatan melebihi target dengan capaian 120,11%. Ada kelebihan pendapatan sebesar Rp.4.344.042.674,00

4.2 Rekomendasi

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian yang belum memenuhi target diantaranya penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan baik sumber daya kesehatan, sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan persalinan dan kesehatan bayi, meningkatkan pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan ibu dan bayi; penguatan komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan semakin meningkatnya implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi; dan penguatan peran aktif lintas sektor.